

BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan pada Kabupaten Kolaka adalah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional dengan rujukan perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional sehingga terjadi sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Sebagai salah satu wujud sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah penerapan konsep pendekatan pembangunan daerah secara menyeluruh melalui suatu visi dan misi dengan sejumlah strategi yang telah berjalan beberapa tahun terakhir ini. Strategi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kolaka selama ini senantiasa mengacu pada berbagai regulasi Perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pengimplementasiannya sangat berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sampai pada regulasi Operasional Implementasi Perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis penjabaran operasionalnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bertolak dari amanah Perundang-undangan tersebut maka setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagian besar pengguna. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan pencapaian kinerja. Sehingga informasi yang tersedia dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka meliputi:

1. informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Kolaka;
2. informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Kolaka mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013 dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya penatausahaan hasil pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD dalam kaitannya dengan penyusunan laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Neraca Daerah dan Aliran Kas. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disajikan dalam bentuk perhitungan APBD termasuk penilaian kinerja Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Daerah berlandaskan pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007, Pasal 232 ayat (5) yaitu dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan

keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).

1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013, terdiri dari:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Akuntansi Pemerintah

Bab 5 Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan
- 5.2 Penjelasan dan Rincian Masing-Masing Non Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.3 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan

dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas,
Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1 Gambaran Umum Kabupaten Kolaka
- 6.2 Kepemimpinan Daerah
- 6.3 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Bab 7 Penutup



BPKAD - PEMKAB KOLAKA

BAB 2 **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN** **PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kolaka cenderung semakin membaik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di bidang ekonomi, khususnya kebijakan di bidang fiskal diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap perbaikan ekonomi daerah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi Kabupaten Kolaka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 PDRB Kabupaten Kolaka berdasarkan harga berlaku sebesar Rp7.262.465.000.000,35 pada Tahun 2012 naik menjadi Rp8.601.461.000.000,49. Sedangkan berdasarkan harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp3.313.202.000.000,80 dan pada Tahun 2012 mencapai Rp3.808.060.000.000,23. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan tahun 2011 sebesar 13,07%, dan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,94%. Hal ini disebabkan total PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 13% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan sebesar 21,48%. Terdapat pula sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan sektor konstruksi/bangunan sebesar 5,36%. Sedangkan mengenai besaran pertumbuhan PDRB pada sektor ekonomi lainnya adalah sebagai berikut: Sektor pertanian tumbuh sebesar 24,53%, sektor industri pengolahan sebesar 14,83%, sektor listrik dan air bersih 0,49%, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 18,07%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,23%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,00%, dan sektor jasa-jasa 7,02%.

Pendapatan perkapita yang ditunjukkan dengan nilai PDRB perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Kolaka atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun tahun 2011 hingga 2012 PDRB perkapita Kabupaten Kolaka berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 4,1%. Kondisi perekonomian makro Kabupaten Kolaka pada tahun 2013 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2012. Sejalan dengan trend yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka tahun 2012 diperkirakan tetap berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara, yang akan didominasi oleh sektor Industri pengolahan, Pertanian, Perdagangan, hotel dan restoran; Jasa-jasa, Bangunan; Keuangan; Pengangkutan dan komunikasi. Ekonomi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Sulawesi Tenggara, diestimasikan masih mampu berkembang dan bertumbuh secara

dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi ekksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal).

Perkembangan ekonomi nasional sudah barang tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Kolaka Tahun 2012. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka pada tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan Tahun 2011, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta nilai ekspor dan impor yang proporsional. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Sulawesi Tenggara, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga. Pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka diproyeksikan pada kisaran 12,01-12,50%. Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada Tahun 2009, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Tahun 2012 masih tetap mampu mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kolaka.

Dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Kolaka Tahun 2012 perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar yang digunakan sebagai rujukan untuk menetapkan besaran biaya dan belanja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan sebagai pedoman di dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 selain mengacu kepada kondisi lokal daerah, juga tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBN Tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, maka asumsi yang digunakan merupakan perpaduan antara asumsi kondisi lokal dan kondisi nasional.

Perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar Rp9.941 triliun;
- b. nilai tukar rupiah terhadap dolar AS rata-rata sebesar Rp9.600;
- c. suku bunga SBI tiga bulan sebesar kurang lebih 5,0%;
- d. produksi (lifting) minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 840 ribu barel;

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. dasar harga minyak mentah Indonesia adalah sebesar US\$ 108/barel;
- f. defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,6% dari PDB;
- g. pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5% tahun 2013;
- h. angka pengangguran terbuka diturunkan sampai dengan 1,5% s/d 2,0% dari angkatan kerja;
- i. jumlah penduduk miskin ditekan sampai kisaran 14-16%.

Mengingat kondisi lokal di Kabupaten Kolaka yang berbeda dari kondisi Indonesia secara umum, maka asumsi yang digunakan untuk Kabupaten Kolaka adalah:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkisar Rp8.640 triliun sampai dengan Rp9.941 triliun;
- b. nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 9.600;
- c. harga bahan bakar minyak (BBM) mengikuti harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. defisit anggaran diproyeksikan maksimal sebesar 3,5%;
- e. pertumbuhan ekonomi diluar migas berkisar antara 6,2 sampai dengan 6,5%;
- f. angka pengangguran terbuka diturunkan sampai 8%;
- g. jumlah penduduk miskin ditekan sampai 20%.

Lain-lain asumsi sesuai dengan Pidato kenegaraan Presiden RI dalam Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri melalui kenaikan gaji dan tunjangan mengalami peningkatan sebesar 7%. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, dinyatakan bahwa dalam merencanakan Belanja Pegawai supaya diperhitungkan *accres* gaji sebesar 2,5% untuk mengantisipasi berbagai perubahan gaji pegawai negeri sebagai akibat adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, perubahan jumlah jiwa dan penambahan pegawai baru dan mutasi kepegawaian lainnya.

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

2.2.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013

Kebijakan Keuangan bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumberdaya aparat pengelola pendapatan daerah serta kemampuan dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan

pada masyarakat dengan memperhatikan aspek kepentingan umum. Namun dalam pejalanannya setelah penetapan APBD, terjadi krisis ekonomi global yang berdampak langsung kepada perekonomian Indonesia.

Salah satu sektor yang terkena dampak langsung pada Kabupaten Kolaka adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor yang dominan penyumbang PAD, dengan menurunnya produksi disektor ini, yang berdampak pada penurunan penerimaan PAD. Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian target pendapatan daerah secara kumulatif yang direncanakan pada APBD perubahan TA 2013 yang ditetapkan turun sekitar 5 persen dari target pendapatan sebelum perubahan.

2.2.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memegang peranan penting dalam PAD. Untuk memaksimalkan penerimaan pada sektor ini dibutuhkan penggalan potensi sumber pendapatan daerah secara optimal dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat serta keseimbangan lingkungan.

Pada APBD Perubahan tahun 2013 total Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp897.103.610.459,00 atau mengalami peningkatan sebesar 1,23% dari target Pendapatan Daerah Induk Tahun 2013 sebesar Rp.886.215.784.436,00. Target PAD sebesar Rp46.718.073.262,00 atau mengalami kenaikan sebesar 20,19% dari APBD Induk sebesar Rp38.869.470.436,00, Dana Perimbangan diproyeksikan naik sebesar 1,94% menjadi Rp746.110.827.817,00, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp15.257.226.436,00 atau mengalami kenaikan sekitar 8,61% dari APBD Induk TA 2013.

Comment [A1]: 20,19%

2.2.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan antara lain peningkatan sarana dan prasarana seperti pembangunan dan rehabilitasi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Kolaka serta pembangunan dan rehabilitasi pos-pos PAD yang dianggap berpotensi dalam peningkatan penerimaan PAD. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dalam hal penerimaan pendapatan daerah. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah mengacu kepada hasil analisa kegiatan optimalisasi PAD.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.2.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Komponen Belanja APBD Perubahan Kabupaten Kolaka TA 2013 terbagi atas belanja tidak langsung untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional satuan Kerja Perangkat Daerah secara rutin dan belanja langsung untuk membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Alokasi tersebut diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada Tahun 2013 Belanja Daerah sebesar Rp958.835.973.428,81 dan pada APBD Perubahan TA 2013 diproyeksikan sebesar Rp896.415.784.436,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,96%.

2.2.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan kebutuhan maka dalam penyusunan kebijakan umum APBD Perubahan TA 2013 ditetapkan bahwa jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp528.681.147.528,81 yang meliputi:

Comment [A2]: 528681147529

1. Belanja Pegawai

Sesuai dengan Pidato kenegaraan Presiden RI dalam Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri ditempuh melalui peningkatan gaji dan tunjangan mengalami sebesar rata-rata 7%. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013, dinyatakan bahwa dalam merencanakan Belanja Pegawai juga harus diperhitungkan *accres* gaji setinggi-tingginya 2,5% hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai perubahan gaji pegawai negeri sebagai akibat adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, perubahan jumlah jiwa dan penambahan pegawai baru dan mutasi pegawai lainnya. Selanjutnya kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah dalam hal pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil, maka penyediaan alokasi dana dalam APBD Perubahan TA 2013 untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka secara kumulatif direncanakan sebesar Rp457.137.245.528,81.

Belanja pegawai juga dianggarkan sebesar Rp5.385.870.866,00 untuk pembayaran Asuransi Kesehatan (ASKES) Sosial tahun 2013 sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah.

Maka penyediaan alokasi dana dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai baik itu pembayaran Gaji PNSD, Gaji Anggota DPRD, Operasional Pimpinan DPRD, Penunjang Bupati/Wakil Bupati, Askes Pemda, Tunjangan Lauk Pauk, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi, dan Insentif Retribusi SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp457.137.245.528,81 atau meningkat 1,67% dari target sebelum perubahan yaitu sebesar Rp449.646.690.840,00. Peningkatan ini bersumber dari Penambahan Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2013, serta Tambahan Sisa Sertifikasi Guru Tahun 2011 dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2011 dan Tahun 2012.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam APBD Perubahan TA 2013 tidak direncanakan belanja bunga karena tidak ada utang Pemerintah Daerah yang jatuh tempo.

3. Belanja Hibah

Alokasi belanja Hibah pada perubahan APBD Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp35.267.536.000,00. Alokasi ini mengalami penambahan sebesar Rp11.867.536.000,00 dibandingkan dengan alokasi belanja hibah sebelum perubahan yang direncanakan sebesar Rp23.400.000.000,00. Penambahan ini bersumber dari rencana tambahan hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kolaka Rp9.000.000.000,00, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kolaka Rp1.500.000.000,00, Dana Pengamanan Tertutup Pilkada (Kodim) Rp750.000.000,00, Pagar Keliling Kantor Sub-Detasemen Polisi Militer Kolaka Rp150.000.000,00, Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) Kodim Kolaka sebesar Rp200.000.000,00, Pramuka Kolaka Rp250.000.000,00, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kolaka Rp100.000.000,00, Kegiatan Dekranas Kolaka Rp115.000.000,00, Ayu Record Kolaka Rp100.000.000,00 dan Transport Jamaah Haji Kolaka (Kementrian Agama Kolaka) Rp309.000.000,00, Sewa Gedung Menara Global Jakarta (Pemerintah Provinsi Sultra) Rp80.000.000,00, Pengamanan Pemilu Pilkada Polres Rp813.536.000,00, dan pengurangan anggaran DOB Kolaka Timur Rp1.500.000.000,00.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan

perubahannya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi belanja bantuan sosial ditujukan untuk kelompok/anggota masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka serta untuk dana *sharing* Pemerintah Daerah untuk Program PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Lingkungan, dan PNPM Perumahan.

Mengingat komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk tetap mendukung organisasi maupun kelompok masyarakat terutama yang turut berperan serta didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka alokasi dana untuk belanja Bantuan Sosial dalam APBD-P Tahun Anggaran 2013 yang akan datang secara kumulatif direncanakan sebesar Rp3.550.000.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp50.000.000,00 dari APBD TA.2013 sebelum perubahan.

5. Belanja Bagi Hasil

Mengacu pada peraturan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Kolaka berkewajiban untuk mengalokasikan dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, khususnya yang bersumber dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pada APBD TA 2013 sebelum dan sesudah perubahan, pos ini belum direncanakan

6. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan pada Perubahan APBD tahun 2013 direncanakan sebesar Rp30.726.366.000,00, yang terdiri atas Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan (ADD/TPAPD, Dana Block Grant Desa, serta Insentif Imam Desa, Guru Mengaji, Pendeta, Pinandita dan Pasraman) sebesar Rp30.303.200.000,00 serta bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp423.166.000,00. Alokasi ini mengalami penambahan sebesar Rp2.500.000.000,00 bila dibandingkan dengan alokasi belanja bantuan keuangan sebelum perubahan sebesar Rp28.226.366.000,00. Penambahan ini bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp3.300.000.000,00 berupa bantuan dana block grant untuk 220 Desa, dimana masing-masing Desa dialokasikan sebesar Rp15.000.000,00. Namun demikian terdapat pengurangan alokasi dana ADD/TPAPD sebesar Rp800.000.000,00 yang dialihkan pada program/kegiatan prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, serta penyediaan dana atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Alokasi Belanja Tidak Terduga pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 direncanakan Rp2.000.000.000,00. Alokasi ini mengalami pengurangan bila dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan yang ditargetkan sebesar Rp3.500.000.000,00. Pengurangan ini bersumber dari pergeseran kelebihan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Tahun 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00, dari jenis Belanja Tidak

Terduga ke Belanja Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka untuk diakumulasikan pada Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Tahun 2013.

2.2.2.3 Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Khusus mengenai Belanja Langsung, secara keseluruhan mencerminkan program dan kegiatan daerah, kebijakan umum APBD Perubahan tetap memperhatikan pokok-pokok kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009-2014 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. Komponen Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, yang secara umum diharapkan akan dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar masyarakat. Belanja Langsung ini diarahkan kepada urusan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Kolaka, sehingga pilihan pendanaan untuk urusan ini betul-betul memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Jumlah Belanja Langsung pada APBD Perubahan TA 2013 dianggarkan sebesar Rp430.154.825.900,00 yang akan membiayai 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada 103 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri atas dua bagian yakni Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD Perubahan TA 2012 serta Realisasi APBD Tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2013. Disamping itu, Pembiayaan Daerah diarahkan pula untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam rangka penyelesaian angsuran pokok pinjaman yang merupakan kewajiban daerah, terutama yang berkaitan dengan pembayaran pinjaman daerah. Selanjutnya mengenai Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan dan Strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD Perubahan TA 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup SiLPA TA sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan Pembiayaan pada APBD Perubahan TA 2013 direncanakan sebesar Rp71.532.362.969,81.

2.2.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian

pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Perubahan TA 2013, secara kumulatif direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00 yang disediakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp9.800.000.000,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka pada Kebijakan Umum Anggaran sebelum perubahan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Kolaka, namun setelah perubahan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009-2014 yang telah ditetapkan Peraturan Daerahnya oleh DPRD Kabupaten Kolaka dengan visi adalah:

"KOLAKA EMAS 2010"

Dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai konsep dasar dari visi itu: Kolaka EMAS terbentuk atas dua kata yaitu: *KOLAKA EMAS*, merupakan simbolisasi dari suatu keadaan masyarakat yang menjadi harapan yaitu kondisi Kabupaten Kolaka yang religius, berkeadilan, aman, berbudaya dan sejahtera, yang bermakna menata masa depan, dimana apabila dijabarkan lebih jauh hal ini dapat bermakna bahwa segala kebutuhan pokok dasar dari masyarakat telah terpenuhi, meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 75. Jika diuraikan secara terminologi dari kata pernyataan visi di atas, sebagai berikut:

- Religius** : Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan Ajaran Agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spritual dan kecerdasan emosional (kepedulian sosial).
- Berkeadilan** : Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata.
- Aman** : Terjaminnya rasa aman masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi.
- Sejahtera** : Terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) dan hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi, tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan kerja yang memadai, dan terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, budaya yang berbasis kerakyatan.
- Berbudaya** : Menumbuhkembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Kolaka yang agamis, berbudaya dan nilai kejuangan kedalam etika sosial bermasyarakat, dimana masyarakat Kabupaten Kolaka memiliki karakteristik kepedulian yang tinggi antar sesama, tangguh, dan disiplin, memasyarakatkan nilai-nilai

musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik, gotong-royong dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

2010 : Merupakan tahun momentum awal dimulainya Kolaka Emas menuju kesempurnaan tatanan kehidupan masyarakat dan secara bertahap dan berkesinambungan hingga Tahun 2014.

Adapun sasaran yang akan dijabarkan dari visi tersebut adalah:

1. Terpenuhiya kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan;
2. Menekan jumlah penduduk miskin melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat dalam gerakan pembangunan;
3. Peningkatan stabilitas sosial dan keagamaan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar yakni jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, sarana air minum, energi listrik;
5. Perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
6. Penguatan kemampuan daya saing ekonomi dan daya saing daerah melalui peningkatan investasi;
7. Pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan untuk dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan di atas, maka ditetapkan empat misi yang digunakan sebagai pedoman dan arah dalam merumuskan strategi/kebijakan dan program kegiatan pada semua sektor pembangunan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat
 - a. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spritual serta semangat nilai perjuangan dan budaya lokal;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, pemberdayaan generasi muda, peningkatan peran wanita dan pengembangan olah raga;
 - c. Mendorong tercapainya peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif sehingga dapat membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keberpihakan pada masyarakat lapis bawah, penguatan lembaga-lembaga sosial budaya, dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, damai, tertib dan tentram.
2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
 - a. Mewujudkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, transparan, dan partisipatif;
 - b. Mewujudkan sistem pelayanan masyarakat yang terpadu, efektif dan efisien;

- c. Mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa;
 - d. Mewujudkan kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara konsisten, adil dan tidak diskriminatif dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
3. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
- a. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah secara berkelanjutan;
 - b. Mempercepat pemerataan pembangunan dalam rangka memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan antar lapisan kelompok masyarakat.
4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
- a. Mendorong tercapainya peningkatan kehidupan perekonomian melalui penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, pengembangan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, UMKM dan Investasi;
 - c. Mendorong pertumbuhan pertanian melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas dan perkembangan agribisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
- a. Mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dalam kerangka mencapai pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mendorong pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Kolaka menerapkan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan berbasis pedesaan dan kerakyatan;
2. Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
3. Pembangunan berbasis investasi;
4. Pengembangan kegiatan agribisnis dan agroindustri;
5. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
6. Pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme dan budaya lokal;
7. Pengembangan dan Pemekaran wilayah;
8. Pembangunan dengan pendekatan kemitraan dan pemberdayaan.

Lebih lanjut strategi kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan menjadi kebijakan pembangunan, masing-masing kebijakan yang bertalian dengan sasaran ingin dicapai, selengkapnya disajikan sebagai berikut:

Misi 1 : Mengembangkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat, melalui:

- Kebijakan 1:* Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan sasaran: •Meningkatnya kualitas pendidikan.
- Kebijakan2:* Meningkatkan pembangunan dan pembinaan kesehatan, dengan sasaran: •Meningkatnya derajat kesehatan.
- Kebijakan 3:* Meningkatkan pembangunan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (GERBANG MASTRA), dengan sasaran: •Meningkatnya kualitas kesejahteraan penduduk.
- Kebijakan 4:* Meningkatkan pembinaan potensi generasi muda dan prestasi olah raga dan seni, dengan sasaran: •Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan dan prestasi olah raga dan seni.
- Kebijakan 5:* Meningkatkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah, dengan sasaran: •Meningkatnya kelestarian budaya daerah •Meningkatnya kualitas pariwisata daerah.
- Kebijakan 6:* Meningkatkan potensi masyarakat melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan sasaran: •Meningkatnya kualitas pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Kebijakan 7:* Meningkatkan dukungan pelaksanaan kehidupan keagamaan, dengan sasaran: •Meningkatnya kepatuhan umat dalam menjalankan ajaran agama.
- Kebijakan 8:* Merubah pola pikir dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sekolah bagi anak perempuan, khususnya bagi masyarakat di pedesaan serta meningkatnya pelayanan pendidikan formal dan informal bagi kaum perempuan, dengan sasaran: •Meminimalisasikan ketimpangan gender pada tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA.
- Kebijakan 9:* Meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & UndangUndang Perlindungan Anak, dengan sasaran: •Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dalam kehidupan bermasyarakat.
- Kebijakan10:* Meningkatkan pelaksanaan latihan/kursus bagi perempuan, dengan sasaran: •Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Misi 2 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, melalui:

- Kebijakan 1:* Meningkatkan kualitas, kepatuhan, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai, dengan sasaran: •Meningkatnya kualitas budaya kerja aparatur.

- Kebijakan 2:* Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui perancangan struktur organisasi yang ramping, kaya fungsi, fleksibel, dan perancangan regulasi serta prosedur, dengan sasaran:
•Meningkatnya efesiensi dan efektifitas birokrasi.
- Kebijakan 3:* Mengefektifkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah untuk mencegah dan mengurangi KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran:
•Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- Kebijakan 4:* Pengembangan dan pemekaran wilayah, dengan sasaran:
•Mengembangkan wilayah pemerintahan.
- Kebijakan 5:* Mengupayakan rumusan kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan terjangkau yang didukung adanya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, dengan sasaran:
•Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat .
- Kebijakan 6:* Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, aset, arsip daerah serta mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan sasaran: •Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan, aset dan arsip daerah.
- Kebijakan 7:* Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja, ketersediaan dan akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk peningkatan SDM dalam pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah, dengan sasaran: •Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya.
- Kebijakan 8:* Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: •Meningkatnya kerjasama daerah.
- Kebijakan 9:* Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, dengan sasaran: •Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah.
- Kebijakan10:* Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat /lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam

pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan iptek, dengan sasaran: •Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan 11: Meningkatkan partisipasi stakeholders dalam bidang pengawasan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar dan masyarakat dapat mengukur keberhasilan kinerja pemerintah, dengan sasaran: •Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan pembangunan.

Kebijakan 12: Penerapan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dan aparatur secara konsisten, dengan sasaran: •Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan 13: Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian, narkoba, prostitusi dan peredaran miras, dengan sasaran: •Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit masyarakat (minuman keras, judi, narkoba dan prostitusi).

Kebijakan 14: Pembekalan bagi masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian bencana alam serta pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan bantuan bencana alam, dengan sasaran: •Meningkatnya pelayanan penanggulangan dini bencana alam.

Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, melalui:

Kebijakan 1: Membangun dan meningkatkan serta memelihara sarana dan prasarana dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang, dengan sasaran: •Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan •Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan •Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman •Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Kebijakan 2 : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan, dengan sasaran: •Mengecilnya kesenjangan antar wilayah dan antar lapisan kelompok masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, melalui:

Kebijakan 1 : Pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran: •Berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat melalui koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kebijakan2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan UKM, industri, perdagangan dan investasi daerah, dengan sasaran: •Meningkatnya sektor usaha kecil

dan menengah •Meningkatnya usaha sektor industri dan perdagangan •Meningkatnya usaha penanaman modal.

Kebijakan 3: Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dengan sasaran: •Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Kebijakan 4: Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dengan sasaran: •Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan •Termanfaatkannya lahan kritis dan marginal untuk pengelolaan pertanian dalam arti luas.

Kebijakan 5: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran: •Terkelolanya lingkungan pesisir •Termanfaatkannya sumber daya pertambangan dan energi yang terbarukan •Bertambahnya produksi dan jenis SDA yang bisa dieksploitasi.

Misi 5 : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui:

Kebijakan 1: Meningkatkan pemahaman masyarakat dan swasta terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran: •Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.

Kebijakan 2: Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, dengan sasaran: •Meningkatnya kemampuan dalam mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Kebijakan 3: Mendorong kesadaran terhadap lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan sasaran: •Meningkatnya upaya menjaga kelestarian/keseimbangan lingkungan dalam eksploitasi sumber daya alam •Tersosialisasikannya prosedur pengelolaan sumber daya alam •Terkendalnya laju okupasi hutan •Meningkatnya kelestarian kawasan hutan.

Kebijakan pembanguan tersebut kemudian diimplementasikan menjadi program-program pembangunan prioritas sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Program Pelayanan KB dan Kesehatan;
3. Program Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Lini Depan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan;
5. Program Peningkatan Peran Pranata Sosial;
6. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan;
7. Program Pembangunan Generasi Muda dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Program Pengembangan Masyarakat Sejahtera Kecamatan dan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Desa/Kelurahan;

9. Program Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
10. Program Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Energi;
11. Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih;
12. Program Peningkatan Infrastruktur;
13. Program Pengembangan Permukiman dan Perumahan;
14. Program Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal;
15. Program Pengamanan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai;
16. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
17. Program Pengembangan Komoditi Kelapa Sawit di Kolaka bagian Timur;
18. Program Pengembangan Komoditi dan Pembangunan Pabrik Kakao;
19. Program Pengembangan Kawasan Industri Perikanan;
20. Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan;
21. Program Penguatan Ekonomi Rakyat;
22. Program Pengembangan Ketahanan Pangan;
23. Program Pengembangan Ternak;
24. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan;
25. Program Gerakan Kolaka Menanam dan Pemanfaatan Lahan Tidur;
26. Program Gerakan Penghijauan dan Reboisasi Daerah Tangkapan Air;
27. Program Pembinaan Masyarakat Miskin, Cacat, Terbelakang dan Anak Terlantar;
28. Program Fasilitasi Pemekaran Wilayah Kolaka Timur, Kolaka Selatan dan Peningkatan Status Kota Kolaka;
29. Program Pengembangan Fasilitas Perkotaan dan Bangun Praja;
30. Program Fasilitasi Pelayanan Perizinan;
31. Program Peningkatan Pelatihan Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Peralatan dan Modal Kerja;
32. Program Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Pembangunan Politik yang Sehat;
33. Program Peningkatan dan Pembinaan Stabilitas, Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Program-program tersebut di atas dituangkan dalam APBD Induk dalam APBD Perubahan TA 2013 yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program dan kegiatan yang disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 APBD Induk dan APBD Perubahan TA 2013

URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	38.869.470.436,00	46.710.073.262,00	7.840.602.826,00	20,17%

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Dana Perimbangan	731.916.993.000,00	746.110.827.817,00	14.193.834.817,00	1,94%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	115.429.321.000,00	104.282.709.380,00	(11.146.611.620,00)	(9,66)%
Jumlah Pendapatan	886.215.784.436,00	897.103.610.459,00	10.887.826.023,00	1,23%
Belanja Daerah				
Belanja Tidak Langsung	508.273.056.840,00	528.681.147.528,81	20.408.090.688,81	4,02%
Belanja Langsung	388.142.727.596,00	430.154.825.900,00	42.012.098.304,00	10,82%
Jumlah Belanja	896.415.784.436,00	958.835.973.428,81	62.420.188.992,81	6,96%
Surplus (Defisit)	(10.200.000.000,00)	(61.732.362.969,81)	(51.532.362.969,81)	505,22%
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00	71.532.362.969,81	51.532.362.969,81	257,66%
Pengeluaran Pembiayaan	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	0,00	0,00%
Pembiayaan Bersih	10.200.000.000,00	61.732.362.969,81	51.532.362.969,81	505,22%
SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00%

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 adalah sebesar Rp914.352.720.583,86 atau 101,92% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp897.103.610.459,00. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp791.911.541.080,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp122.441.179.503,86 (Rp914.352.720.583,86 - Rp791.911.541.080,00) atau naik 15,46% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian Pendapatan Daerah Per SKPD disajikan pada **Lampiran 1**.

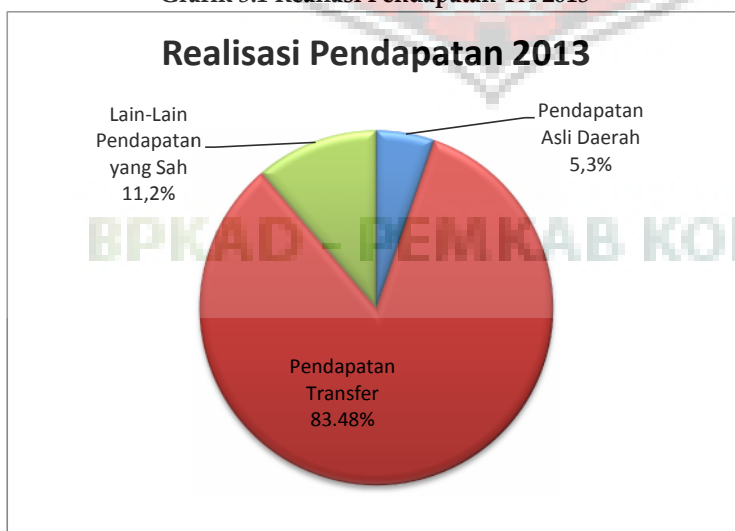
Ikhtisar realisasi pencapaian target pendapatan daerah TA 2013, yakni pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan Daerah TA 2013

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2013	% Pencapaian Anggaran	%Komposisi
Pendapatan Asli Daerah	46.710.073.262,00	48.110.908.447,86	103%	5,26%
Pendapatan Transfer	746.110.827.817,00	763.383.058.799,00	102,31%	83,49%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	104.282.709.380,00	102.858.753.337,00	98,63%	11,25%
Jumlah Pendapatan	897.103.610.459,00	914.352.720.583,86	101,92%	100,00%

Realisasi pendapatan TA 2013 disajikan dengan grafik 3.1 berikut.

Grafik 3.1 Realiasi Pendapatan TA 2013



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.1.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah TA 2013 adalah sebesar Rp903.668.595.153,00 atau 94,25% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp 958.853.973.428,81. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp596.991.589.086,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Daerah TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp306.677.009.067,00 (Rp903.668.595.153,00 - Rp596.991.589.086,00) atau naik 151,37% dibandingkan dengan realisasi TA 2012.

Belanja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu: 1) rincian belanja menurut organisasi, 2) rincian belanja menurut fungsi, 3) rincian belanja menurut program dan kegiatan, 4) rincian belanja menurut urusan pemerintahan, 5) rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung dan 6) rincian menurut jenis belanja.

Rincian total belanja menurut organisasi, fungsi, urusan pemerintah disajikan pada **Lampiran 2**. Rincian belanja menurut urusan pemerintahan untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara disajikan pada **Lampiran 3**. Rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung disajikan pada **Lampiran 2**. Rincian belanja menurut program dan kegiatan disajikan pada **Lampiran 4**. Belanja pemerintah daerah menurut jenis belanja diuraikan pada **Catatan 5.1.41** sampai dengan **Catatan 5.1.47**.

Ikhtisar realisasi pencapaian target Belanja Daerah TA 2013 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Belanja Daerah TA 2013

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2013	% Pencapaian Anggaran	% Komposisi
Belanja Operasi	728.107.229.504,81	687.892.066.425,00	94,48%	76,12%
Belanja Modal	198.002.377.924,00	185.388.769.673,00	93,63%	20,52%
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.814.158.055,00	90,71%	0,20%
Transfer Ke Desa	30.726.366.000,00	28.573.601.000,00	92,99%	3,16%
Jumlah Belanja	958.835.973.428,81	903.668.595.153,00	94,25%	100,00%

Ikhtisar realisasi pencapaian target belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yakni pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara TA 2013.

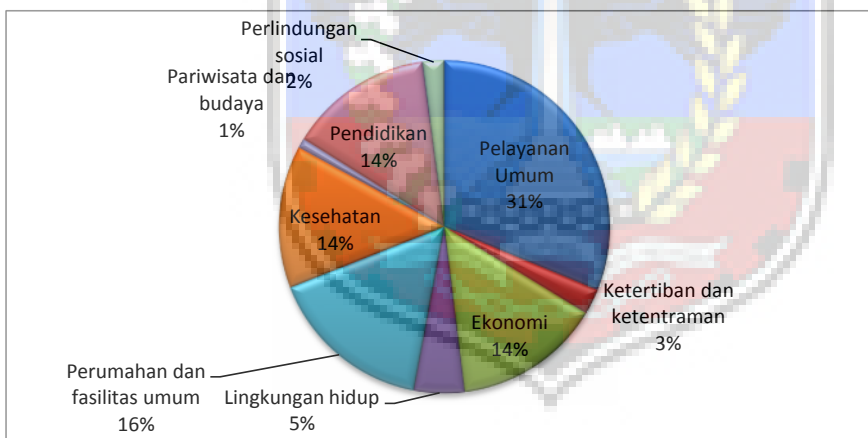
Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2013	% Pencapaian Anggaran	% Komposisi
Pelayanan Umum	134.210.216.593,00	125.300.040.909,00	93,36%	31,20%
Ketertiban dan ketentraman	11.737.512.500,00	9.987.388.527,00	85,09%	2,49%
Ekonomi	64.566.431.225,00	57.613.144.718,00	89,23%	14,35%

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2013	% Pencapaian Anggaran	% Komposisi
Lingkungan hidup	22.211.847.140,00	19.790.652.027,00	89,10%	4,93%
Perumahan dan Fasilitas Umum	65.509.109.440,00	64.612.774.681,00	98,63%	16,09%
Kesehatan	60.762.290.509,00	55.578.348.069,00	91,47%	13,84%
Pariwisata dan budaya	4.016.964.600,00	3.724.327.119,00	92,71%	0,93%
Pendidikan	58.376.533.993,00	56.446.191.632,00	96,69%	14,06%
Perlindungan sosial	8.763.919.900,00	8.496.236.136,00	96,95%	2,12%
Jumlah	430.154.825.900,00	401.549.103.818,00	93,35%	100,00%

Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara disajikan dengan grafik 3.2 berikut.

Grafik 3.2 Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara



3.1.3 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Bersih TA 2013 adalah sebesar Rp56.746.562.969,81 atau 91,92% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp61.732.362.969,81. Sedangkan Realisasi Pembiayaan Bersih Tahun 2012 sebesar Rp26.641.409.299,83. Hal ini berarti realisasi Pembiayaan Bersih TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp30.105.153.669,98 (Rp56.746.562.969,81-Rp26.641.409.299,83) atau naik 113% dibandingkan dengan realisasi TA 2012.

Ikhtisar realisasi pencapaian target Pembiayaan, yakni pada Tabel 3.4 berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.4 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah TA 2013

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2013	% Pencapaian Anggaran
Penerimaan Pembiayaan	71.532.362.969,81	66.546.562.969,81	93,03%
Pengeluaran Pembiayaan	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	100,00%
Pembiayaan Bersih	61.732.362.969,81	56.746.562.969,81	91,92%



BPKAD - PEMKAB KOLAKA

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.1.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai berikut.

1. Entitas Akuntansi SKPD yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun dan memeriksa laporan kepada BPKAD atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya.

Entitas akuntansi SKPD Kabupaten Kolaka adalah sebanyak 96 satuan kerja yang terdiri dari 2 Sekretariat yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah, 15 Dinas, 11 Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat, delapan Badan, tiga Kantor dan satu BLUD Benyamin Guluh), dan 23 Kecamatan, serta 1 Sekretariat Korpri dan 48 Kelurahan.

2. Entitas Sekretariat Daerah dhi. Bagian Keuangan selaku BUD menyusun laporan keuangan daerah dengan cara mengkompilasi Laporan dan Entitas Akuntansi SKPD. Disamping itu Bagian Keuangan juga menyusun Laporan Kas Umum Daerah dalam fungsi dan tanggung jawab sebagai BUD.

Dalam pelaksanaannya Entitas Akuntansi BPKAD masih mengalami hambatan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan pelaku fungsi Entitas Akuntansi SKPD dalam peranan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan tahunan maupun laporan semesteran masih mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2013 disusun dan disajikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat keterbatasan pemahaman/penguasaan di bidang akuntansi pemerintah yang masih belum memadai. Namun demikian, basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan TA 2013 adalah sebagai berikut.

1. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUD.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD) atau dikeluarkan dari KUD. Belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran diakui setelah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
3. Laporan Arus Kas disajikan dengan metode langsung yang mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2013 sebagai berikut.

4.2.1 Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyesihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke provinsi/kabupaten/kota;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara.
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sumbangan.
5. Biaya Dibayar di Muka disajikan sebesar selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya pada akhir periode pelaporan dan dapat diakui sebagai hak menagih.

4.2.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.2.3 Aktiva Tetap

1. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
2. Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan
3. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya

untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

4. *Meubelair* dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
5. Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
6. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.
7. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
8. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
9. Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
10. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
11. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

4.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya diukur dengan nilai perolehannya (setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir).

4.2.5 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan

ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

4.2.6 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang tanpa harus dibayar kembali. Ekuitas Dana yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi Ekuitas Dana.

4.2.7 Pendapatan

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan.

4.2.8 Belanja

Pengukuran belanja nonmodal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.2.9 Pembiayaan

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Akuntansi Pemerintah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Kebijakan Akuntansi maupun Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah belum diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka mengingat pemahaman pengelola keuangan/PA/KPA terhadap akuntansi yang masih terbatas, maka yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2013 adalah sebagai berikut.

4.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas

di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Persediaan dan Biaya Dibayar di Muka.

- a. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- b. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pihak yang menangani investasi jangka pendek tersebut. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
- c. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
- d. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- e. Biaya Dibayar di Muka disajikan sebesar selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya pada akhir periode pelaporan dan dapat diakui sebagai hak menagih.

4.3.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

a. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Nonpermanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi daerah dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Nonpermanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota

koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada perusahaan daerah, lembaga nasional/internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Daerah/Badan Hukum Milik Daerah (BUMD/BHMD). PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai nonBUMD.

PMD dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan nonsurat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan nasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

4.3.3 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 berdasarkan pada harga perolehan untuk aset yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012. Untuk perolehan Aset Tetap sebelum TA 2004 didasarkan pada hasil penilaian Perusahaan Penilai Independen.

Menurut PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2013 dan 2012, seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Begitu juga dengan kebijakan batas minimal kapitalisasi aset belum diterapkan. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap.

4.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti rekening dana Jaminan Reklamasi.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PPA. Di samping itu, tagihan piutang/retribusi macet yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan c.q. KPCLN juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

4.3.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi pemerintah, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan.

4.3.6 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, seperti penyertaan, aktiva tetap dan aktiva lainnya. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3.7 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.8 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran. Belanja disajikan di muka (*on face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

4.3.9 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUD serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).



BPKAD - PEMKAB KOLAKA

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan dan Rincian Pos-Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut.

5.1.1 Kas di Kas Daerah

Jumlah ini merupakan saldo kas daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp63.640.167.309,67 dan Rp63.409.976.158,81 yang merupakan saldo yang ditempatkan pada lima bank berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
PD Bank Pembangunan Daerah Sultra		
- BPD Sultra Cab. Kolaka 002 01.02.000051-4	8.720.717.473,00	13.398.209.294,00
- BPD Sultra Cab. Kolaka 002 01.02.000822-6	229.095.213,00	2.470.496.066,00
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero)		
- BRI Cab. Kolaka 00000216-01-00030-30	2.495.026.509,00	2.445.662.423,00
PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero)		
- BNI Cab. Kolaka 0080349944	1.312.756.499,00	1.208.978.318,00
- BNI Cab. Kendari 0140857317		-
PT Bank Mandiri Tbk. (Persero)		
- Bank Mandiri Cab. Kolaka 152-00-1002760-1	50.507.954.697,13	43.517.636.078,27
PT Bank Muamalat		
- Bank Muamalat Capem Kolaka 8220000615	368.601.887,54	368.651.887,54
Kelebihan pembayaran PFK	6.015.031,00	342.092,00
Jumlah	63.640.167.309,67	63.409.976.158,81

Pada rekening tersebut terdapat penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp41.716.684,00 dan sebesar Rp10.010,00 (**Catatan 5.1.22**).

5.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp129.842.190,00 dan Rp195.207.788,00 yang merupakan sisa uang persediaan yang belum disetor ke kas daerah, penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetor ke kas negara dan pendapatan jasa giro yang belum disetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Sisa UP TA 2011	47.744.000,00	61.546.333,00
Sisa UP TA 2012	0,00	68.175.421,00
Sisa UP TA 2013	51.832.829,00	0,00
Potongan PFK	29.960.889,00	65.246.371,00
Pendapatan Jasa Giro	304.472,00	239.663,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Jumlah	129.842.190,00	195.207.788,00

Saldo sisa uang persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp61.546.333,00 telah disetorkan ke kas daerah pada TA 2013 sebesar Rp13.802.333,00 dan belum disetor sebesar Rp47.744.000,00 yang merupakan sisa uang persediaan Dinas Pertambangan dan Energi.

Dari jumlah sisa uang persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp129.842.190,00, sampai dengan 5 Mei 2014 telah dilakukan pengembalian sebesar Rp40.249.448,00. Dari jumlah pengembalian sebesar Rp40.249.448,00 tersebut, terdapat pengembalian sebesar Rp18.384.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum. Jumlah uang persediaan yang seharusnya dikembalikan oleh Dinas Pekerjaan Umum berjumlah Rp18.375.000,00, sehingga terdapat kelebihan pengembalian sebesar Rp9.000,00.

Saldo PFK yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp29.960.889,00 dan Rp65.246.371,00 (**Catatan 5.1.22**). Pendapatan Jasa Giro yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp304.472,00 dan Rp239.663,00. Pendapatan jasa giro ini tidak menambah SiLPA di Neraca, namun menambah saldo EDL Pendapatan yang Ditangguhkan (**Catatan 5.1.26**). Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp276.287.631,00 dan Rp7.562.500,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening dibank maupun saldo uang tunai yang merupakan tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Kas di Bendahara Penerimaan-Dinas Pendapatan	263.651.350,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan-Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	7.000.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan-Kecamatan Wundulako	12.636.281,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan-Kecamatan Kolaka	0,00	562.500,00
Jumlah	276.287.631,00	7.562.500,00

Dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan sebesar Rp263.651.350,00 tersebut, diantaranya sebesar Rp22.500.000,00 sudah tidak berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan. Selain itu dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Kecamatan Wundulako sebesar Rp12.636.281,00, diantaranya sebesar Rp Rp5.436.281,00 sudah tidak berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp27.936.281,00 (Rp22.500.000,00 + Rp5.436.281,00) yang sudah tidak dalam penguasaan Bendahara Penerimaan tidak memenuhi definisi sebagai kas.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Jumlah Kas di BLUD RS Benyamin Guluh per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp3.732.660.946,00 dan Rp2.992.675.067,00 yang merupakan saldo yang berada pada rekening dan tunai dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
BNI Cabang Kolaka Nomor rekening 0241579808	3.083.979.148,00	2.551.753.592,00
Tunai	648.681.798,00	440.921.475,00
Jumlah	3.732.660.946,00	2.992.675.067,00

5.1.5 Piutang Pajak Daerah

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp13.937.055.929,00 dan Rp0,00.

Nilai Piutang Pajak Daerah berasal dari nilai piutang PBB-P2 berdasarkan BAST Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-02/WPJ.15/KP.1401/2013 tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp12.656.073.202,00 dan piutang PBB-P2 tahun 2013 sebesar Rp1.280.982.727,00. Jumlah sebesar Rp12.656.073.202,00 terdiri dari:

- nilai piutang pajak tahun pajak 2002-2011 sebesar Rp8.924.154.591,00;
- nilai piutang pajak tahun berjalan (2012) sebesar Rp3.431.187.357,00;
- nilai piutang yang deluarsa (s.d. 2011) sebesar Rp300.731.254,00.

Nilai piutang PBB-P2 tahun 2013 belum sepenuhnya didukung dengan rincian yang memadai karena adanya pembayaran secara kolektif yang menyulitkan identifikasi penyetoran PBB-P2 yang sudah dibayar.

5.1.6 Piutang Retribusi Daerah

Jumlah Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp1.259.087.910,00 dan Rp568.622.600,00. Piutang ini merupakan piutang sewa loss Pasar Mekongga sebesar Rp712.410.410,00 dan piutang retribusi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan sebesar Rp546.677.500,00. Rincian piutang sewa loss Pasar Mekongga dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.1.7 Piutang PAD Lainnya

Jumlah Piutang PAD Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp48.155.200,00 dan Rp48.155.200,00. Rincian saldo Piutang PAD Lainnya 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Piutang Penjualan Aspal Tahun 2007 & 2008	26.755.200,00	26.755.200,00
Piutang Penjualan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	21.400.000,00	21.400.000,00
Jumlah	48.155.200,00	48.155.200,00

5.1.8 Piutang BLUD

Jumlah Piutang BLUD RS Benyamin Guluh per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.497.198.442,43 dan Rp263.487.376,00, dengan rincian sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Piutang Jamkesmas	2.471.342.547,04	235.966.085,00
Piutang Bahteramas	1.753.095,39	27.521.291,00
Piutang Askes	349.640.800,00	0,00
Piutang Jamkesda	674.462.000,00	0,00
Jumlah	3.497.198.442,43	263.487.376,00

Piutang Jamkesmas sebesar Rp2.471.342.547,04 merupakan tagihan/klaim kepada Kementerian Kesehatan RI atas jasa pelayanan rumah sakit yang timbul dari bulan Juli sampai dengan Desember 2013, sesuai dengan hasil verifikasi independen BLUD RS Benyamin Guluh Kab. Kolaka serta surat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI Nomor PR. 03.01/I.1/655/08 tanggal 8 Februari 2014.

Selain dari Piutang Jamkesmas, BLUD RS Benyamin Guluh juga akan menerima dana dari Bahteramas hasil verifikasi independen untuk bulan Desember 2013 sebesar Rp1.753.095,39, piutang Askes Desember 2013 sebesar Rp349.640.800,00 serta dana dari Jamkseda hasil dari verifikasi independen bulan Desember sebesar Rp674.462.000,00.

5.1.9 Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi.

Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp5.258.310.505,00 dan Rp11.483.618.178,00 dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Penerimaan	Keputusan	Periode	Nilai
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	SK Gubernur No 95 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014	TA 2013	740.622.145,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN - KB)	SK Gubernur No 95 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014	TA 2013	1.413.631.834,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	SK Gubernur No 95 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014	TA 2013	3.104.056.526,00
Jumlah			5.258.310.505,00

5.1.10 Piutang Kekurangan Transfer

Jumlah Piutang Kekurangan Transfer per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp87.266.344,00 dan Rp87.266.344,00. Piutang ini merupakan kesalahan perhitungan dalam SK Gubernur Nomor 277 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007 untuk periode Januari s.d. Mei 2007. Dalam SK tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka kurang mendapat Bagi Hasil Pajak sebesar Rp87.266.344,00 yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 79/HP/XIX.KDR/6/2008 tanggal 26 Juni 2008. Piutang Kekurangan Transfer ini belum diterima hingga 31 Desember 2013.

5.1.11 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Berdasarkan KSAP Nomor 6 tentang Piutang, peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan SKTJM-nya per 31 Desember 2012 sebanyak 17 kasus dengan nilai sebesar Rp852.271.783,00. Jumlah yang telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp230.360.621,00. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2013 adalah masing masing sebesar Rp0,00 karena seluruh Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2013 disajikan pada Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi telah direklasifikasi menjadi Aset Lancar. Oleh karena Tagihan Tuntutan Ganti Rugi seluruhnya telah diklasifikasikan menjadi Aset Lancar maka Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi akan disajikan pada akun tersendiri yaitu Piutang Tuntutan Ganti Rugi (**Catatan 5.1.12**).

5.1.12 Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang Tuntutan Ganti Rugi ini merupakan tuntutan ganti rugi yang telah ditetapkan SKTJM-nya per 31 Desember 2013 dan telah jatuh tempo. Per 31 Desember 2012 perkiraan ini disajikan pada Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Catatan 5.1.11). TGR yang telah ditetapkan SKTJM-nya sebanyak 17 kasus dengan nilai sebesar Rp852.271.783,00. Jumlah yang telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp230.360.621,00. Saldo per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp621.911.162 dan Rp705.011.162,00. Rincian Piutang TP/TGR per 31 Desember 2013 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.13 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp26.067.351.631,00 dan Rp25.380.318.167,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
a. Piutang PT Ronggolawe Perkasa	14.396.019.224,00	14.396.019.224,00
b. Piutang PT Kolaka Mining Internasional	2.485.378.617,00	2.485.378.617,00
c. Piutang Kompensasi PPh TKI DPRD	419.328.000,00	419.328.000,00
d. Piutang PPh BOP DPRD	132.300.000,00	132.300.000,00
e. Piutang TKI DPRD TA 2006	1.441.263.000,00	1.441.263.000,00
f. Piutang BOP DPRD	225.780.000,00	305.460.000,00
g. Piutang Deviden BPD	6.967.282.790,00	6.200.569.326,00
Jumlah	26.067.351.631,00	25.380.318.167,00

a. Piutang PT. Ronggolawe Perkasa

Pada Tahun 2008 dan 2009 Pemerintah Kabupaten Kolaka memperoleh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dari PT Antam Tbk. dalam bentuk *Slag D-S* dan *scraf feronikel* yang kemudian dijual kepada PT Ronggolawe Perkasa. Total kewajiban PT. Ronggolawe Perkasa Per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 yang belum diselesaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka sebesar Rp14.396.019.224,00 dan Rp14.396.019.224,00, Rincian lebih lanjut Piutang PT Ronggolawe Perkasa dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

b. Piutang PT. Kolaka Mining Internasional

Pada TA 2010, Pemerintah Kabupaten Kolaka memperoleh CSR dari PT Inco Tbk. dalam bentuk nikel kadar rendah (*ore*) dengan estimasi sebanyak 222.000 WMT yang dituangkan dalam bentuk naskah serah terima pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah di Blok Pomalaa PT Inco Tbk pada 25 Juli 2010. Pemerintah Kabupaten Kolaka kemudian melakukan perikatan jual beli dengan PT Kolaka Mining Internasional (KMI) tanggal 28 Juni 2010 dengan harga \$10 untuk setiap WMT. PT KMI sudah menyetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp14.858.321.390,00. Berdasarkan dokumen pengapalan PT KMI s.d. 20 Mei 2011, PT KMI telah mengangkut sebanyak 191.643,094 WMT dengan nilai sebesar Rp17.343.700.007,00 ($191.643,094 \times 10 \times \text{Rp}9.050,00$). Sehingga PT KMI masih mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka sebesar Rp2.485.378.617,00 ($\text{Rp}17.343.700.007,00 - \text{Rp}14.858.321.390,00$). Diperkirakan masih terdapat kurang lebih 30.356,91 WMT ($222.000,00 - 191.643,09$) yang belum diangkut oleh PT KMI dari Lokasi PT Inco Tbk. berdasarkan angka perkiraan.

Pada Tahun 2013 PT KMI tidak melakukan penyetoran piutang sehingga Piutang PT KMI Per 31 Desember 2013 dan Per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.485.378.617,00 dan Rp2.485.378.617,00.

c. Piutang Kompensasi PPh TKI DPRD

Piutang Kompensasi PPh Pasal 21 atas Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayar pada TA 2006 yang dibatalkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebesar Rp419.328.000,00.

d. Piutang PPh BOP DPRD

Piutang kompensasi PPh Pasal 21 atas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD serta BOP Pimpinan DPRD Kesalahan Klasifikasi Penerimaan PAD dan Penganggaran Alokasi Dana Bagi Hasil yang menetapkan bahwa kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2010 adalah kategori "sedang", yang seharusnya kategori "rendah", sebesar Rp132.300.000,00.

e. Piutang TKI DPRD

Piutang TKI DPRD per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.441.263.000,00 yang merupakan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayar pada TA 2006 kemudian dibatalkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	Saldo 31 Desember 2012	Pengembalian	Saldo 31 Desember 2013
1	Syafaruddin, SE	143.871.000,00	0,00	143.871.000,00
2	Hj. Suharty Berty, S.Sos	141.871.000,00	0,00	141.871.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama	Saldo 31 Desember 2012	Pengembalian	Saldo 31 Desember 2013
3	Drs. H. Pamus Sundding	31.326.750,00	0,00	31.326.750,00
4	Syamsuddin Salihi, BA	68.115.000,00	0,00	68.115.000,00
5	La Ode Imran, K, SH	69.615.000,00	0,00	69.615.000,00
6	Drs. Rustam Sabona	66.115.000,00	0,00	66.115.000,00
7	Muh. Amir, S. Sos	45.615.000,00	0,00	45.615.000,00
8	H. Syamsuddin. P.S.Pdi	69.615.000,00	0,00	69.615.000,00
9	Drs. Syarifuddin, SH	63.615.000,00	0,00	63.615.000,00
10	Ramli Madjid, SE., MH	61.615.000,00	0,00	61.615.000,00
11	Sulaiman Hakim, SE	47.335.000,00	0,00	47.335.000,00
12	H. Arifuddin	69.615.000,00	0,00	69.615.000,00
13	Hj. Djuhra, A.Md	66.134.250,00	0,00	66.134.250,00
14	Muhammad Hasbi, SE	68.615.000,00	0,00	68.615.000,00
15	Agusalim Tahir, SE	67.115.000,00	0,00	67.115.000,00
16	Abd. Kadir	69.615.000,00	0,00	69.615.000,00
17	Ir. Hasdin Al Djuddawie, M.Si	42.615.000,00	0,00	42.615.000,00
18	Rusdin Najamuddin	69.615.000,00	0,00	69.615.000,00
19	Asman, S.Pd	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
20	Yustiti Andi Hamid, SH	69.615.000,00	0,00	69.615.000,00
21	Yacob Bulo, SE	69.615.000,00	0,00	69.615.000,00
	Total	1.441.263.000,00	0,00	1.441.263.000,00

f. Piutang BOP DPRD

Piutang sebesar Rp850.500.000,00 yang merupakan Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD serta BOP Pimpinan DPRD, Kesalahan Klasifikasi Penerimaan PAD dan Penganggaran Alokasi Dana Bagi Hasil yang menetapkan bahwa kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2010 adalah kategori "sedang", yang seharusnya kategori "rendah", yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Sampai dengan 31 Desember 2013 telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp624.220.000,00 sehingga saldo Piutang BOP DPRD per 31 Desember 2013 sebesar Rp225.780.000,00 Dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	Piutang DPRD	Pengembalian	Saldo Per 31/12/2013
1	Parmin Dasir, SE	71.820.000,00	71.820.000,00	0,00
2	Drs. H. Suaib Kasra	46.620.000,00	30.000.000,00	16.620.000,00
3	Drs. Tajuddin. M	46.620.000,00	20.000.000,00	26.620.000,00
4	Ir. Sirwan Jaya Razak, M.Si	21.420.000,00	10.000.000,00	11.420.000,00
5	H. Rahmatia, L. SE	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama	Piutang DPRD	Pengembalian	Saldo Per 31/12/2013
6	Muh. Ajib Madjid	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
7	H. Abd. Muis Kore	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
8	H. M. Jufri, HB, SE	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
9	Hj. Andi Merya Nur	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
10	Hasunuddin Yusuf, SH	21.420.000,00	7.000.000,00	14.420.000,00
11	Sudirman, SH	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
12	H. Syahrul Beddu, Sip, MH	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
13	H. Umar Tebu, S.Sos, M.Si	21.420.000,00	18.000.000,00	3.420.000,00
14	Hj. Suharty, S. Sos	21.420.000,00	10.000.000,00	11.420.000,00
15	H. Joni Symasuddin, SH, M.Hum	21.420.000,00	11.000.000,00	10.420.000,00
16	H. Achmad Fachruddin, ST	21.420.000,00	18.420.000,00	3.000.000,00
17	I Ketut Maria Asmara, STP	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
18	Dra. Hj. Nursiah	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
19	Rusman, S.Pd	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
20	Anwar Anas, S.Pd	21.420.000,00	11.000.000,00	10.420.000,00
21	Takdir Dg. Mattajang, SE	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
22	H. Abbas Landau	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
23	Suardi Pato, SE	21.420.000,00	1.000.000,00	20.420.000,00
24	Drs. Muh. Akring Johar	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
25	Wayan Darmawan	21.420.000,00	19.920.000,00	1.500.000,00
26	H. Ridwan Basnapal	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
27	Sainal Amrin, SE	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
28	Muslihuddin	21.420.000,00	10.420.000,00	11.000.000,00
29	Ramli Madjid, SE, MH	21.420.000,00	6.000.000,00	15.420.000,00
30	Drs. Syarifuddin, MH	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
31	Anang Juniaprida	21.420.000,00	3.000.000,00	18.420.000,00
32	Muhlis	21.420.000,00	7.000.000,00	14.420.000,00
33	Ir. Ardianto, MB	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
34	Arafah, ST	21.420.000,00	6.000.000,00	15.420.000,00
35	Amir Basit, SH, MH (Alm)	21.420.000,00	0,00	21.420.000,00
Jumlah		850.500.000,00	624.720.000,00	225.780.000,00

g. Piutang Deviden BPD

Piutang deviden BPD sebesar Rp6.967.282.790,00 merupakan piutang deviden Tahun Buku 2013 berdasarkan hasil RUPS BPD Sulawesi Tenggara tanggal 26 Februari 2014.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Berdasarkan KSAP Nomor 6 tentang Piutang, aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Pemerintah Kabupaten Kolaka belum menetapkan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih.

5.1.15 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp6.152.548.597,00 dan Rp5.678.602.202,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31/12/2013	Per 31/12/2012
Persediaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan	5.755.483.822,00	5.356.451.285,00
Persediaan Bahan Makanan	438.000,00	124.000,00
Persediaan ATK dan Cetak	348.626.775,00	322.026.917,00
Persediaan Bibit Tanaman	0,00	0,00
Persediaan Bibit Hewan Ternak	0,00	0,00
Persediaan Suku Cadang	0,00	0,00
Persediaan Buku Pelajaran untuk Dibagikan	0,00	0,00
Persediaan Bahan Bangunan	48.000.000,00	0,00
Jumlah	6.152.548.597,00	5.678.602.202,00

Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan terdapat pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
BLUD RS Benyamin Guluh	1.580.901.574,00	1.183.755.249,00
Dinas Kesehatan	4.174.582.248,00	4.172.696.036,00
Jumlah	5.755.483.822,00	5.356.451.285,00

Saldo persediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak merupakan saldo persediaan pada SKPD yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik oleh SKPD per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Dinas Pendidikan Nasional	930.000,00	950.000,00
Dinas Kesehatan	2.551.000,00	1.024.000,00
BLUD RS Benyamin Guluh	8.740.250,00	6.735.500,00
Dinas Pekerjaan Umum	5.502.500,00	5.286.500,00
Bappeda	130.000,00	260.500,00
Dinas Perhubungan	2.769.500,00	195.000,00
Badan Lingkungan Hidup	813.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	157.448.500,00	195.134.550,00
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	1.304.000,00	598.000,00
Dinas Sosial	910.500,00	988.550,00
Dinas Transmigrasi	540.000,00	1.045.125,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Dinas Koperindag	1.848.500,00	3.344.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.811.650,00	594.250,00
Badan Kesbang dan Linmas	860.000,00	330.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	860.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	4.286.400,00	5.233.400,00
Sekretariat DPRD	2.296.110,00	5.680.000,00
BPKAD	18.574.000,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	3.000.000,00	493.000,00
Inspektorat	2.629.500,00	4.115.500,00
Dinas Pendapatan	115.189.500,00	74.024.000,00
Kantor Penghubung	450.000,00	350.000,00
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	818.000,00	604.000,00
Bapersikom	435.000,00	962.000,00
Sekretariat Korpri	139.000,00	0,00
BPMD	1.110.000,00	542.000,00
Dinas Pertanian	677.000,00	0,00
Dinas Pertambangan	285.300,00	450.500,00
Badan Pelaksanaan Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	435.000,00	738.000,00
Dinas Kehutanan	7.574.400,00	9.615.250,00
Dinas Perkebunan	435.000,00	275.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	50.000,00
Kecamatan Kolaka	0,00	150.000,00
Kecamatan Samaturu	115.000,00	85.000,00
Kecamatan Tanggetada	0,00	50.000,00
Kecamatan Mowewe	0,00	321.000,00
Kecamatan Uluiwoi	181.000,00	592.000,00
Kecamatan Baula	47.165,00	0,00
Kecamatan Watubangga	50.000,00	0,00
Kecamatan Polinggona	471.000,00	0,00
Kecamatan Uesi	78.000,00	0,00
Kecamatan Lambandia	0,00	145.000,00
Kecamatan Toari	1.085.000,00	0,00
Kelurahan Kolakaasi	40.000,00	0,00
Kelurahan Kowioha	93.500,00	108.000,00
Kelurahan Lamokato	0,00	0,00
Kelurahan Watuliandu	0,00	0,00
Kelurahan Lamekongga	100.000,00	410.000,00
Kelurahan Ngapa	0,00	0,00
Kelurahan Kumoro	0,00	0,00
Kelurahan Horodopi	12.500,00	67.500,00
Kelurahan Inebengi	0,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Kelurahan Iwoitombo	0,00	0,00
Kelurahan Lalolae	0,00	0,00
Kelurahan Penanggo Jaya	0,00	90.000,00
Kelurahan UluWolo	0,00	389.792,00
Jumlah	348.626.775,00	322.026.917,00

Rincian Persediaan bahan Bangunan :

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Dinas Sosial	48.000.000,00	0,00
Jumlah	48.000.000,00	0,00

5.1.16 Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp72.916.666,67 dan Rp147.916.666,67 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Belanja Sewa Tempat	0,00	0,00
Belanja Asuransi kendaraan Roda 4	0,00	75.000.000,00
Belanja Premi Asuransi	72.916.666,67	72.916.666,67
Jumlah	72.916.666,67	147.916.666,67

Uraian	31/12/2012	31/12/2011
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	75.000.000,00
Sekretariat DPRD	72.916.666,67	72.916.666,67
Jumlah	72.916.666,67	147.916.666,67

Biaya Dibayar di Muka Premi Asuransi berada pada Sekretariat DPRD atas asuransi kumpulan anggota DPRD yang direalisasikan/dibayar pada TA 2013 sebesar Rp175.000.000,00 untuk periode 28 Mei 2013 s.d. 27 Mei 2014, sehingga masih terdapat premi asuransi sebesar Rp72.916.666,67 yang belum dinikmati prestasinya per 31 Desember 2013.

5.1.17 Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Jumlah Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp2.505.788.000,00 dan Rp2.520.488.000,00. Investasi Nonpermanen ini merupakan dana bergulir yang dinilai sebesar pokok yang digulirkan kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan jangka waktu pengembalian 24 bulan yang dikenakan bunga dan tanpa bunga dengan tingkat pengembalian dana bergulir, yakni sebagai berikut.

No	Keterangan	Nilai	Pengembalian per 31 Desember 2013	Saldo per 31 Desember 2013	% Pengembalian
1	Penyaluran 2010	150.000.000,00	2.921.000,00	147.079.000,00	1,95
2	Penyaluran 2009	358.200.000,00	15.150.000,00	343.050.000,00	4,23
3	Penyaluran 2008	979.000.000,00	230.769.000,00	748.231.000,00	23,57

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Keterangan	Nilai	Pengembalian per 31 Desember 2013	Saldo per 31 Desember 2013	% Pengembalian
4	Penyaluran 2007	1.394.245.000,00	126.817.000,00	1.267.428.000,00	9,10
	Jumlah	2.881.445.000,00	375.657.000,00	2.505.788.000,00	13,04

Umur investasi nonpermanen dana bergulir per 31 Desember 2013 berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut.

No.	Tahun Penyaluran	Jatuh Tempo Berdasarkan Umur Investasi Non Permanen			
		0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-3 Tahun	Lebih dari 3 Tahun
1	Penyaluran 2010	-	-	147.079.000,00	-
2	Penyaluran 2009	-	-	343.050.000,00	-
3	Penyaluran 2008	-	-	594.275.000,00	153.956.000,00
4	Penyaluran 2007	-	-	1.267.428.000,00	-
	Jumlah			2.351.832.000,00	153.956.000,00

5.1.18 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp44.626.315.970,26 dan Rp39.126.315.970,26. Rincian penyertaan modal pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut.

No	BUMD	Nilai Investasi		Metode Pencatatan
		2012	2013	
1	BPD Sulawesi Tenggara	13.696.000.000,00	19.196.000.000,00	Biaya
2	PDAM Kolaka	3.023.178.576,78	3.023.178.576,78	Ekuitas
3	PD Aneka Usaha Kolaka	21.365.327.393,48	21.365.327.393,48	Ekuitas
4	PD BPR Bahteramas Kolaka	1.041.810.000,00	1.041.810.000,00	Biaya
	Jumlah	39.126.315.970,26	44.626.315.970,26	

Pada TA 2013 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp9.800.000.000,00 masing-masing untuk BPD Sulawesi Tenggara sebesar Rp5.500.000.000,00 dan PDAM Kolaka sebesar Rp4.300.000.000,00. Disamping itu juga terdapat penambahan penyertaan modal oleh Kecamatan Kolaka sebesar Rp5.000.000,00 pada BPR Bahteramas Kolaka.

PDAM Kolaka telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2013, namun laporan keuangan tersebut belum diaudit oleh KAP. Berdasarkan laporan keuangan PDAM Kolaka yang belum diaudit, PDAM Kolaka mencatat nilai ekuitas sebesar Rp11.831.315.855,41 atau terdapat perbedaan sebesar Rp8.808.137.278,63 dari pencatatan nilai investasi pemerintah daerah sebesar Rp3.023.178.576,78. Nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh KAP belum memungkinkan pencatatan nilai investasi pemerintah daerah yang akurat.

PD Aneka Usaha Kolaka telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2013, namun laporan keuangan tersebut belum diaudit oleh KAP. Berdasarkan laporan keuangan PD Aneka Usaha Kolaka yang belum diaudit, PD Aneka Usaha Kolaka mencatat nilai ekuitas sebesar Rp28.408.478.208,60 atau terdapat perbedaan sebesar Rp7.043.150.815,12 dari pencatatan nilai investasi pemerintah daerah sebesar Rp21.365.327.393,48. Nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang belum diaudit oleh KAP belum memungkinkan pencatatan nilai investasi pemerintah daerah yang akurat.

PD BPR Bahteramas Kolaka telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2013 dan melaporkan jumlah penyertaan Pemerintah Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2013 sebesar Rp997.500.000,00. Jumlah penyertaan tersebut berbeda dengan pencatatan investasi Pemerintah Kabupaten Kolaka sebesar Rp1.041.810.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp44.310.000,00. Terhadap selisih tersebut belum dapat dijelaskan lebih lanjut.

5.1.19 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2.311.458.781.301,50 dan Rp2.122.463.655.973,50. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan) karena Pemerintah Kabupaten Kolaka sampai saat ini belum memiliki kebijakan mengenai penyusutan aktiva tetap.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama TA 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2013 (Rp)	Penambahan	
		Belanja Modal TA 2013	Kapitalisasi
1	2	3	4
Tanah	175.861.091.216,00	5.875.145.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	288.022.148.240,40	38.220.885.383,00	0,00
Gedung dan Bangunan	540.635.287.049,00	68.909.956.600,00	120.000.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.066.787.411.870,00	70.181.176.201,00	1.814.158.055,00
Aset Tetap Lainnya	34.272.515.538,10	900.904.000,00	729.751.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	16.885.202.060,00	1.300.702.489,00	0,00
Nilai Buku	2.122.463.655.973,50	185.388.769.673,00	2.663.909.055,00

Uraian	Hibah dari Pemerintah Lain dan Pihak Ketiga	Reklas dari Aset Tetap (Rp)	Reklas dari Aset Lain-lain dan Koreksi (Rp)	Total Penambahan Aset Tetap
Tanah	0,00	0,00	0,00	181.736.236.216,00
Peralatan dan Mesin	304.957.000,00	0,00	563.059.600,00	327.111.050.223,40
Gedung dan Bangunan	0,00	10.535.171.000,00	314.030.000,00	620.514.444.649,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	2.651.949.560,00	0,00	1.141.434.695.686,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.903.170.538,10
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	8.440.317.185,06	0,00	26.626.221.734,06
	304.957.000,00	21.627.437.745,06	877.089.600,00	2.333.325.819.046,56

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pengurangan Tahun 2013				Saldo Akhir 31 Desember 2013
	Reklas ke Aset Tak Berwujud	Reklas ke Aset Lain-Lain dan Koreksi	Reklas dari Aset Tetap	Penghapusan	
1	9	10	11	12	13 = (8) - (9+10+11+12)
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	181.736.236.216,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	491.450.000,00	165.000.000,00	326.454.600.223,40
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	7.948.867.185,06	74.600.000,00	612.490.977.463,94
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0	0,00	1.141.434.695.686,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	0,00	35.903.170.538,10
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	13.187.120.560,00	0,00	13.439.101.174,06
Nilai Buku	0,00	0,00	21.627.437.745,06	239.600.000,00	2.311.458.781.301,50

Rincian mutasi Aset Tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10** dan **Lampiran 11**.

a. Aset Tetap Tanah

Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2013 sebesar Rp181.736.236.216,00. Nilai Aset Tetap Tanah tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp175.861.091.216,00 ditambah realisasi Belanja Modal 2013 sebesar Rp5.875.145.000,00.

Aset Tetap Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka, sebesar Rp90.854.788.000,00 atau seluas 3.573.727 m² belum didukung dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak atas Tanah. Rincian tanah SKPD yang belum bersertifikat adalah sebagai berikut.

No.	Nama SKPD	Luas Tanah belum bersertifikat (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.178.449	43.679.016.000,00
2	Bagian Umum	86.528	23.787.497.000,00
3	Bagian Pemerintahan	975.881	9.667.064.000,00
4	BP4K	7.600	30.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	44.696	9.530.611.000,00
6	Dinas Pertanian	100	41.100.000,00
7	BPMD	1.280.473	4.119.500.000,00
Jumlah		3.573.727	90.854.788.000,00

Selain itu, nilai tanah sebesar Rp181.736.236.216,00 tersebut belum termasuk tanah sebagai berikut.

- 1) Tanah yang digunakan untuk 325 ruas jalan sepanjang 115.736,40 m.
- 2) Tanah yang tercatat dalam KIB namun tidak diketahui nilai perolehannya dengan rincian sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Jenis Aset	Tahun Perolehan	SKPD	Keterangan
1.	Tanah	2000	BP4K	Asrama
2.	Tanah	2009	BP4K	Tanah Kantor BPP Kec. Loea
3.	Tanah	2007	RSUD	Gedung Obgyn
4.	Tanah	2008	Kec. Toari	Kantor Kecamatan (Hibah)

- 3) Tanah yang memiliki bukti kepemilikan tetapi tidak diketahui nilai perolehannya, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama BMD	Luas (m ²)	Nomor Sertifikat
1.	Tanah Kantor Inspektorat	1.700	21.02.01.06.2.00017
2.	Tanah Kantor BKD	859	21.02.01.06.2.00019
3.	Tanah Kantor Disdukcapil	1.333	21.02.01.06.2.00018
4.	Tanah Kantor BPMD	868	21.02.01.06.3.00010
5.	Tanah Kantor PMI	407	21.02.01.06.2.00020
6.	Tanah Masjid Pemd	1.684	21.02.01.06.2.00021
7.	Tanah Tempat Rehabilitasi DInsos	1.008	21.02.01.06.2.00015
8.	Tanah SDN 4 Mangolo	4.031	21.02.99.04.4.00012
9.	Tanah TPI Kolakaasi	1.226	21.02.09.03.4.00013
10.	Tanah Kantor Veteran RI	1.593	21.02.01.02.4.00016
11.	Tanah Puskesmas Loea	2.410	21.02.20.01.4.00007
12.	Tanah Kantor Kel. Balandete	1.076	21.02.01.03.4.00049

- 4) Tanah yang dikuasai dan digunakan Pemkab Kolaka tidak tercatat dalam daftar inventaris dan juga belum memiliki bukti kepemilikan minimal sebanyak delapan bidang tanah, yaitu tanah kantor Badan KB dan PP, tanah kantor Dinas Sosial, tanah kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanah kantor Sekretariat DPRD, tanah kantor Kelurahan Ngapaa, tanah kantor Kelurahan Watubangga, tanah kantor Kelurahan Sanggona, dan tanah kantor Kelurahan Tonganapo.

- 5) Terdapat nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.214.876.780,00 yang berasal dari penambahan biaya-biaya lain yang secara langsung menambah nilai Aset Tetap Tanah. Namun, dalam penyajiannya tidak jelas dan tidak dapat diatribusikan ke tanah sesuai lokasinya.

b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2013 sebesar Rp326.454.600.223,40. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp288.022.148.240,40 ditambah realisasi Belanja Modal 2013 sebesar Rp38.220.885.383,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp211.566.600,00 dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Hibah peralatan mesin pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp296.557.000,00;
- 2) Hibah peralatan mesin pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp8.400.000,00.
- 3) Koreksi atas kurang catat peralatan dan mesin pada Dinas Sosial Sebesar Rp563.059.600,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Koreksi penghapusan kendaraan Toyota Kijang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sesuai SK Bupati Kolaka Nomor 554 Tahun 2012 sebesar Rp165.000.000,00.
- 5) Koreksi reklas alat laboratorium yang belum dapat digunakan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp491.450.000,00.

Atas Peralatan dan Mesin tersebut, terdapat Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.803.853.000,00 yang sebagian besar dari hasil appraisal penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Kolaka yang sudah tidak diketahui keberadaannya oleh pengurus barang karena tidak pernah melihat wujud aset tersebut, tidak adanya informasi dari pengurus barang sebelumnya, dan digunakan oleh pihak yang sudah tidak bertugas lagi di Pemkab kolaka. Rekapitulasinya adalah sebagai berikut.

No	Jenis Aset	Nilai	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	14.080.962.000,00	359 unit
2.	Badan Ketahanan Pangan	484.368.000,00	66 unit
3.	Dinas Pertanian	437.300.000,00	33 unit
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	388.200.000,00	10 unit
5.	Dinas Perkebunan	715.700.000,00	57 unit
6.	Dinas Pendidikan	531.348.000,00	64 unit
7.	Dinas Kehutanan	106.235.000,00	6 unit
8.	Dinas Kependudukan dan Capil	30.550.000,00	3 unit
9.	Dinas Koperindag	29.190.000,00	2 unit
Jumlah		16.803.853.000,00	

Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Terdapat biaya-biaya lain yang secara langsung dapat menambah nilai Peralatan dan Mesin. Namun dalam penyajiannya terdapat kapitalisasi yang tidak jelas dan tidak dapat diatribusikan ke masing-masing jenis peralatan dan mesin sebesar Rp565.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Uraian	Jenis Aset	Tahun	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	Kapitalisasi	Peralatan dan Mesin	2004	81.050.000,00
2	Sekretariat Daerah	Kapitalisasi	Peralatan dan Mesin	2008	292.350.000,00
3	Sekretariat Daerah	Kapitalisasi	Peralatan dan Mesin	2009	180.050.000,00
4	Sekretariat Daerah	Kapitalisasi (Proses PBJ)/Pengawasan	Peralatan dan Mesin	2010	5.000.000,00
5	BPMD	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Peralatan dan Mesin	2010	7.000.000,00
Jumlah					565.450.000,00

Selain itu, terdapat peralatan dan mesin yang tidak diketahui nilainya yang berasal dari pihak ketiga namun tidak didukung dengan dokumen BAST hibah, pinjam pakai, dan sejenisnya yang tersebar pada empat SKPD dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki enam unit *dump truck* dan dua unit alat berat berupa *backhoe loader* dan *buldozer*.
 - 2) Hibah tiga unit kendaraan roda dua dari PT Inco pada Dinas Kesehatan yang masing-masing digunakan oleh Sdr. B, Sdr. T, dan Sdr. MY.
 - 3) Hibah meubelair dari PT Inco pada Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Loea sebanyak 32 unit, Puskesmas Tinondo sebanyak 60 unit, Puskesmas Lalolae sebanyak 31 unit, Puskesmas Poli-Polia sebanyak 85 unit, Puskesmas Latambaga sebanyak 29 unit, dan Puskesmas Pomaala satu paket.
 - 4) Hibah meubelair dari PT Antam pada Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Ladongi Welala sebanyak 57 unit.
 - 5) Bantuan dari pemerintah pusat untuk Dinas Sosial yang terdiri dari *dump truck*, mobil *rescue extrada*, *dalpien speed boat*, *speed boat* mesin dalam, mobil tangki air bersih, dan motor kawasaki 150 cc masing-masing satu unit.
 - 6) Hibah dari PT Antam untuk Dinas Sosial berupa *dump truck* satu unit.
 - 7) Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Dinas Perhubungan berupa dua unit kendaraan Damri.
- c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2013 sebesar Rp612.490.977.463,94. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp540.635.287.049,00 ditambah realisasi Belanja Modal TA 2013 sebesar Rp68.909.956.600,00, dan mutasi tambah kurang sebesar Rp2.945.733.814,94 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah aset bangunan dan gedung sebesar Rp10.969.201.000,00 terdiri dari:
 - a) kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp120.000.000,00 atas pembangunan Lumbung Padi Desa Sani - sani pada Badan Ketahanan Pangan;
 - b) reklas dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang realisasi fisik telah selesai 100% sebesar Rp10.428.044.000,00 dari Dinas Perhubungan dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah masing-masing sebesar Rp591.331.000,00, Rp7.920.047.000,00 dan Rp1.916.666.000,00;
 - c) reklas SDN I Tonggoni yang sudah selesai dan dapat dimanfaatkan tetapi baru dibayar sebesar Rp61.407.000,00 yang terdiri dari konstruksi gedung bangunan sebesar Rp53.970.000,00, jasa konsultasi sebesar Rp7.255.000,00, dan kapitalisasi belanja pegawai dan barang jasa sebesar Rp182.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - d) reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang realisasi fisik telah selesai 100% sebesar Rp45.720.000,00 pada Badan Ketahanan Pangan;

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e) koreksi pencatatan aset gedung SDN I Tonggoni sebesar Rp125.930.000,00 dengan nilai kontrak Rp179.900.000,00 yang sudah diserahterimakan seluruhnya oleh rekanan dan sudah dapat dimanfaatkan tetapi baru dibayarkan sebesar Rp53.970.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 - f) koreksi pencatatan aset Islamic Center sebesar yang sudah selesai dibangun sebesar Rp143.500.000,00 karena KDP TA 2012 hanya mencatat sebesar Rp7.920.047.000,00 sedangkan jumlah yang sudah dibelanjakan sampai TA 2012 sebesar Rp8.063.547.000,00 pada Setda;
 - g) koreksi atas kurang catat peralatan dan mesin pada dinas Sosial Sebesar Rp44.600.000,00.
- 2) Mutasi kurang aset bangunan dan gedung sebesar Rp8.023.467.185,06 terdiri dari:
- a) reklas pembangunan gedung kantor Badan KB dan PP Tahap I sebesar Rp1.286.268.425,44 yang belum dapat dimanfaatkan pada Badan KB dan PP terdiri dari bangunan Gedung Kantor Badan KB dan PP sebesar Rp1.201.343.000,00, perencanaan dan pengawasan Gedung Kantor KB dan PP sebesar Rp79.850.000,00, panitia lelang/Pokja ULP proporsi Gedung Badan KB dan PP Rp2.550.465,04, dan honorarium tim PHO/FHO proporsi Gedung Badan KB dan PP sebesar Rp2.524.960,40;
 - b) reklas kolam renang sebesar Rp5.890.288.000,00 pada kompleks GOR Gelora yang belum dapat dimanfaatkan pada Dinas Pendidikan;
 - c) reklas pembangunan gedung Kantor Camat Aere sebesar Rp772.310.759,62 yang belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan yang terdiri dari bangunan gedung kantor sebesar Rp719.215.000,00, perencanaan pembangunan proporsi gedung Kantor Camat Aere sebesar Rp29.795.514,27, pengawasan pembangunan proporsi gedung Kantor Camat Aere sebesar Rp20.726.648,23, dan honor tim PHO/FHO proporsi gedung Kantor Camat Aere sebesar Rp2.573.597,12;
 - d) Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan Gedung kantor dinas kehutanan yang dipakai oleh dinas Sosial sesuai dengan SK No. 2709 tanggal 10 Oktober 2012 Sebesar Rp74.600.000,00.

Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ini terdapat Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang tidak didukung informasi mengenai jenis, alamat, luas, peruntukan, dan keterangan lainnya yang mengakibatkan aset tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut sebesar Rp15.288.332.467,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Letak/ Lokasi	Tahun	Asal-usul	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung			COMDEV	776.529.000,00
2	Pendamping NUSSP		2007		324.173.300,00
3	Pemb. Infrsruktur Pedesaan		2007		7.998.794.580,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Letak/ Lokasi	Tahun	Asal-usul	Harga Perolehan
4	Pemb. / Pemeliharaan Saluran Drainase		2008		1.247.698.000,00
5	Pendamping NUSSP		2008		191.137.587,00
6	Infrastruktur Pedesaan		2009		3.200.000.000,00
7	Infrastruktur Kecamatan		2009		1.550.000.000,00
Jumlah					15.288.332.467,00

Disamping itu terdapat biaya-biaya lain yang secara langsung dapat menambah nilai Gedung dan Bangunan. Namun dalam penyajiannya adanya kapitalisasi yang tidak jelas dan tidak dapat diatribusikan ke masing-masing jenis Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.844.142.140,00. Rincian pada **Lampiran 13**.

Selain itu terdapat Gedung dan Bangunan yang berasal dari pihak ketiga namun tidak didukung dengan dokumen BAST hibah, pinjam pakai, dan sejenisnya pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hibah dari PT Inco berupa gedung Puskesmas Loea sebanyak satu unit, Puskesmas Tinondo sebanyak dua unit, Puskesmas Lalolae sebanyak dua unit, Puskesmas Poli-Polia sebanyak dua unit, Puskesmas Lambandia sebanyak dua unit, dan Puskesmas Tosiba sebanyak satu unit.
- 2) Hibah dari PT Antam untuk Puskesmas Pomaala.
- 3) Gedung dan bangunan SDN dan SMPN yang berasal dari dana Blockgrant Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total nilai sebesar Rp28.371.869.000,00.
- 4) Subsidi sarana dan prasarana pendidikan pada kegiatan pembangunan daerah bencana alam dan kerusakan dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp720.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Lokasi	Nilai Perolehan
1	Rehab RKB SDN 1 Tondowolio	Kec. Watubangga	80.000.000,00
2	Pembangunan kantor SDN 2 Induha	Kec. Latambaga	80.000.000,00
3	Rehab RKB SDN 1 Simbalai	Kec. Loea	80.000.000,00
4	Rehab RKB SDN 2 Raraa	Kec. Ladongi	80.000.000,00
5	Rehab RKB SDN 1 Poli-Polia	Kec. Poli-Polia	80.000.000,00
6	Rehab RKB SDN 1 Wia-Wia	Kec. Poli-Polia	80.000.000,00
7	Rehab RKB SDN 1 Penanggosi	Kec. Lambandia	80.000.000,00
8	Rehab RKB SDN 2 Lamunde	Kec. Watubangga	160.000.000,00
Jumlah			720.000.000,00

d. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.141.434.695.686,00. Nilai Aset Tetap Jalan,

Irigasi dan Jaringan tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.066.787.411.870,00 ditambah realisasi Belanja Modal 2013 sebesar Rp70.181.176.201,00 dan mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut.

- 1) kapitalisasi dari Belanja Tak Terduga SKPKD sebesar Rp1.814.158.055,00 yang terdiri dari :
 - a) pembangunan Bronjong Sungai Rina Desa Ulu Lapao - pao Kec Wolo sebesar Rp569.900.000,00;
 - b) pemasangan Bronjong Sungai Balandete Kec Kolaka sebesar Rp499.670.000,00;
 - c) penanganan Tanggul Sungai Balandete, Sungai Laloeha dan Sungai Puroda sebesar Rp544.588.055,00; dan
 - d) penimbunan dan Pengerasan Areal Gedung PKP-PK Bandar Udara Sangia Ni Bandera sebesar Rp200.000.000,00
- 2) Reklas dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang realisasi fisik telah selesai 100% sebesar Rp2.651.949.560,00 dari Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ini termasuk jalan pada Dinas Pekerjaan Umum yang tidak didukung informasi yang memadai yang mengakibatkan aset tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut sebesar Rp38.250.508.872,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Disamping itu terdapat biaya-biaya lain yang secara langsung dapat menambah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan. Namun penyajian biaya tersebut tidak jelas dan tidak dapat diatribusikan ke masing-masing jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.210.682.638,00. Rincian pada **Lampiran 15**.

Selain itu, terdapat jalan, jaringan, dan irigasi yang yang tidak diketahui nilainya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hibah dari PT Inco kepada Dinas Kesehatan berupa pembuatan sumur bor Puskesmas Watubangga (belum ada BAST Hibah); dan
 - 2) pada Dinas PU terdapat enam aset berupa pemasangan JTR, pemasangan sambungan rumah murah, talud rumah adat, deuker plat beton taha, deuker latambaga, dan deuker Pelambua.
- e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2013 sebesar Rp35.903.170.538,10. Nilai Aset Tetap Lainnya tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp34.272.515.538,10 ditambah realisasi Belanja Modal 2013 sebesar Rp900.904.000,00 dan mutasi tambah kapitalisasi dari belanja Study Batas Kawasan Kebisingan Bandara Sangia Ni Bandera dari Dinas Perhubungan dan Informatika sebesar Rp729.751.000,00.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2013 sebesar Rp13.439.101.174,06 yang merupakan penambahan dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp16.885.202.060,00, belanja modal sebesar Rp1.300.702.489,00 dan mutasi tambah dan kurang yang terdiri dari:

- 1) Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.440.317.185,06 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) reklas alat laboratorium sebesar Rp491.450.000,00 hasil pengadaan TA 2013 yang belum dapat dimanfaatkan pada BLHK
 - b) reklas pembangunan gedung kantor Badan KB dan PP Tahap I sebesar Rp1.286.268.425,44 yang belum dapat dimanfaatkan pada Badan KB dan PP terdiri dari bangunan Gedung Kantor Badan KB dan PP sebesar Rp1.201.343.000,00, perencanaan dan pengawasan Gedung Kantor KB dan PP sebesar Rp79.850.000,00, panitia lelang/Pokja ULP proporsi Gedung Badan KB dan PP Rp2.550.465,04, dan honorarium tim PHO/FHO proporsi Gedung Badan KB dan PP sebesar Rp2.524.960,4
 - c) reklas kolam renang sebesar Rp5.890.288.000,00 pada kompleks GOR Gelora yang belum dapat dimanfaatkan pada Dinas Pendidikan
 - d) reklas pembangunan gedung Kantor Camat Aere sebesar Rp772.310.759,62 yang belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan yang terdiri dari bangunan gedung kantor sebesar Rp719.215.000,00, perencanaan pembangunan proporsi gedung Kantor Camat Aere sebesar Rp29.795.514,27, pengawasan pembangunan proporsi gedung Kantor Camat Aere sebesar Rp20.726.648,23, dan honor tim PHO/FHO proporsi gedung Kantor Camat Aere sebesar Rp2.573.597,12
- 2) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.187.120.560,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang realisasi fisik telah selesai 100% sebesar Rp10.473.764.000,00 dari Dinas Perhubungan dan Informatika, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Ketahanan Pangan masing masing sebesar Rp591.331.000,00 + Rp7.920.047.000,00 Rp1.916.666.000,00 dan Rp45.720.000,00;
 - b) reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang realisasi fisik telah selesai 100% sebesar Rp2.651.949.560,00;
 - c) reklas SDN I Tonggoni yang sudah selesai dan dapat dimanfaatkan tetapi baru dibayar sebesar Rp61.407.000,00 yang terdiri dari konstruksi gedung bangunan sebesar Rp53.970.000,00, jasa konsultansi sebesar Rp7.255.000,00, dan kapitalisasi belanja pegawai dan barang jasa sebesar Rp182.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.19.1 Kendala dan Permasalahan Dalam Penertiban Aset

Bidang Aset BPKAD masih menghadapi kendala dan permasalahan dalam rangka penertiban aset milik Pemerintah Kabupaten Kolaka, antara lain yaitu:

- kurangnya tanggung jawab Pengguna/Pemakai Barang Milik Daerah, antara lain atas aset berupa kendaraan, meubelair dan komputer atau *notebook*, yang seringkali ikut berpindah tangan atau hilang pada saat mutasi pejabat, dan tidak disertai dokumen atau berita acara pendukung mutasi aset tersebut.
- belum adanya penetapan penggunaan aset untuk setiap SKPD dan masih terjadinya pegawai yang mutasi antar SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka juga sering kali membawa Aset Tetap Peralatan ke tempat SKPD tujuan tanpa diikuti dengan adanya proses mutasi aset tetap.

5.1.20 Aset Tak Berwujud

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp1.121.987.450,00 dan Rp1.121.987.450,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31/12/2013	31/12/2012
1	Software Komputer	1.121.987.450,00	1.121.987.450,00
2	Lisensi dan <i>Franchise</i>	0,00	0,00
3	Paten dan Hak Lainnya	0,00	0,00
4	Hasil Kajian/ Penelitian yang manfaat jangka panjang	0,00	0,00
Jumlah		1.121.987.450,00	1.121.987.450,00

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012 belum memperhitungkan amortisasi (penyusutan) karena Pemerintah Kabupaten Kolaka belum menetapkan kebijakan penyusutan Aset Tak Berwujud. Rincian Aset Tak Berwujud untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut.

No	SKPD	Keterangan	Tahun	Nilai
1	Badan Perpustakaan, Arsip, Informasi dan Komunikasi	Website www.kolakakab.go.id	2010	50.000.000,00
		Perangkat Lunak Database Aplikasi Software	2010	49.900.000,00
		Peningk. Aplikasi Berbasis WEB	2007	41.800.000,00
		Software Komputer CD Master Aplikasi	2009	127.900.000,00
		Aplikasi CD Interaktif 2 Bahasa	2006	36.950.000,00
		Software PAG	2008	13.500.000,00
		Software SMS Polling	2008	7.000.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Software (Perpustakaan)	2009	40.000.000,00
		Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	2010	237.710.000,00
		Instalasi Software SIAK Kec. Wundulako	2006	67.556.000,00
		Instalasi Software SIAK Kab. Kolaka	2005	34.310.000,00
		Instalasi Software	2005	3.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Keterangan	Tahun	Nilai
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Instalasi Software SIAK Kecamatan	2005	18.409.000,00
		Sofware SMPN 1 Mowewe	2010	22.909.150,00
		Sofware SMPN 1 Tinondo	2010	22.909.150,00
		Sofware SMPN 1 Tirawuta	2010	22.909.150,00
		Sofware SMPN 2 Latambaga	2010	25.905.000,00
		Sofware SMPN 1 Kolaka	2010	25.905.000,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	Sofware SMPN 2 Kolaka	2010	25.905.000,00
		Aplikasi Simpeg	2007	50.000.000,00
5	Dinas Pertambangan dan Energi	Software Komputer	2007	39.060.000,00
6	Sekretariat Dewan (DPRD)	Aplikasi Website	2011	77.000.000,00
		Hosting Situs	2011	21.450.000,00
7	Kantor Pelayanan perizinan terpadu	Jaringan Spisi	2012	60.000.000,00
Jumlah				1.121.987.450,00

5.1.21 Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp37.963.505.849,00 dan Rp37.963.505.849,00 tidak ada penambahan aset lain - lain dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012	Mutasi
Panjar	10.835.846.465,00	10.835.846.465,00	
Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya (hilang)	370.687.000,00	370.687.000,00	
Aset Tetap rusak berat	4.885.343.000,00	4.885.343.000,00	
Aset Tetap sudah diserahkan dan dikuasai oleh masyarakat namun belum didukung dengan Naskah Hibah/Beriata Acara Penyerahan	8.919.670.200,00	8.919.670.200,00	
Belanja Modal Bukan Aktiva	886.476.260,00	886.476.260,00	
Belanja Modal BAST Ke Masy	940.067.700,00	940.067.700,00	
Salah Data Aset/ Batal Belanja			
Aset Tetap Bukan Milik Pemkab	5.518.255.700,00	5.518.255.700,00	
Reklasifikasi dari Aktiva Tetap			
Aset Tetap dikuasai daerah Pemekaran	5.519.739.524,00	5.519.739.524,00	
Penghapusan belum ada SK Bupati	87.420.000,00	87.420.000,00	
Jumlah	37.963.505.849,00	37.963.505.849,00	

Untuk saldo panjar sebesar Rp10.835.846.465,00 tersebut, panjar sebesar Rp8.459.981.500,00 telah diproses di pengadilan dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 1010 K/Pid.Sus/2008 dengan menjatuhkan pidana kepada Sdr. Djm penjara selama satu tahun dan pidana

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

denda sebesar Rp100.000.000,00 subsidier pidana kurungan selama tiga bulan dan panjar sebesar Rp1.024.049.800,00 a.n. Sdr. AM juga telah ada putusan pengadilan No. 39/Pid.B/2004/PN Kik. Sedangkan panjar lainnya sebesar Rp1.351.815.165,00 belum ditetapkan sesuai ketentuan. Rincian panjar tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.1.22 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp71.677.573,00 dan Rp65.256.381,00. Potongan PFK tersebut terdiri dari utang PFK BUD sebesar Rp41.716.684,00 dan utang PFK bendahara pengeluaran sebesar Rp29.960.889,00

Potongan PFK yang dipungut BUD sebesar Rp62.637.339.525,00. Jumlah tersebut dicatat sebagai penerimaan nonanggaran pada Laporan Arus Kas dan sebesar Rp62.595.632.851,00 dicatat sebagai pengeluaran nonanggaran pada Laporan Arus Kas dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2012	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Desember 2013
Dipungut oleh BUD				
Pembayaran Gaji & Tunjangan				
Iuran Wajib Pegawai	0,00	26.384.395.258,00	26.353.969.614,00	30.425.644,00
PPh Pasal 21	0,00	5.767.761.601,00	5.756.973.675,00	10.787.926,00
Taperum	0,00	610.455.718,00	610.455.718,00	0,00
Lain-lain	0,00	29.316.154,00	29.272.040,00	44.114,00
Pengadaan Barang dan Jasa				
PPN	10.000,00	16.067.566.858,00	16.067.576.858,00	0,00
PPh Pasal 21	0,00	9.985.362.059,00	9.985.353.059,00	9.000,00
PPh Pasal 22,23, Pasal 4(2)	10,00	3.792.481.877,00	3.792.031.887,00	450.000,00
Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dipungut BUD	10.010,00	62.637.339.525,00	62.595.632.851,00	41.716.684,00

5.1.23 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) atau Utang Belanja per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp125.930.000,00 dan Rp134.472.477,80. Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka atas barang dan jasa yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada PNS.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Utang Belanja kepada Pihak Ketiga	125.930.000,00	0,00
Utang Belanja Askes	0,00	134.472.477,80
Jumlah	125.930.000,00	134.472.477,80

Saldo Utang Belanja TA 2013 sebesar Rp125.930.000,00 merupakan utang kepada pihak ketiga atas aset gedung SDN I Tonggoni dengan nilai kontrak Rp179.900.000,00 yang sudah diserahkan seluruhnya oleh rekanan dan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sudah dapat dimanfaatkan tetapi baru dibayarkan sebesar Rp53.970.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

5.1.24 Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp251.162.999,59.

5.1.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp4.040.157.510,22 dan Rp4.040.157.510,22. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	31/12/2013	31/12/2012
Kelebihan Penerimaan Jasa Giro BRI	121.611.847,00	121.611.847,00
Jaminan Kesungguhan Usaha Pertambangan	163.235.000,00	163.235.000,00
Sisa DPPID	0,00	0,00
Kelebihan Pembayaran Deviden PD Aneka Usaha	3.755.310.663,22	3.755.310.663,22
Jumlah	4.040.157.510,22	4.040.157.510,22

a. Kelebihan Penerimaan Jasa Giro BRI.

Surat dari BRI Nomor B.3816 tanggal 26 November 2009 menyatakan bahwa terjadi kelebihan pembayaran jasa giro rekening kas daerah pada BRI Nomor Rekening 00000216-01-000030-30-5 sebesar Rp121.611.847,00. Berdasarkan surat tersebut Pemerintah Kabupaten Kolaka memiliki kewajiban untuk mengembalikan jasa giro sebesar Rp121.611.847,00.

b. Jaminan Kesungguhan Usaha Pertambangan

Jaminan kesungguhan usaha pertambangan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp163.235.000,00 dan Rp163.235.000,00. Merupakan uang jaminan atas kesungguhan untuk melakukan eksplorasi pertambangan yang dititip di kas daerah dengan rincian sebagai berikut.

No	Perusahaan	Nilai
1	PT Toshida Indonesia	50.000.000,00
2	PT Pertambangan Bumi Indonesia	89.405.000,00
3	PT Citra Arya Sentosa Utama	15.050.000,00
4	PD Aneka Usaha Kolaka	3.400.000,00
5	PT Bola Dunia	2.600.000,00
6	PT Waja Inti Lestari	2.400.000,00
7	PT Cinta Jaya	380.000,00
Jumlah		163.235.000,00

c. Kelebihan Pembayaran Deviden PD Aneka Usaha

Kelebihan pembayaran deviden PD Aneka Usaha sebesar Rp3.755.310.663,22 terjadi karena Pemkab Kolaka telah menerima deviden

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pada TA 2011 sebesar Rp20.000.000.000,00, namun deviden yang seharusnya menjadi hak Pemkab Kolaka sebesar Rp16.244.689.336,78 dengan rincian sebagai berikut.

1) Laba PD Aneka Usaha tahun 2011	Rp	30.069.261.986,83
2) PPh Badan	<u>Rp</u>	<u>8.330.409.500,00</u>
3) Laba setelah pajak (1) - (2)	Rp	21.738.852.486,83
4) Bagian laba/deviden untuk Pemda (70% x (3))	Rp	15.217.196.740,78
5) Kekurangan deviden tahun 2010	Rp	1.027.492.596,00
6) Setoran selama tahun 2011	<u>Rp</u>	<u>20.000.000.000,00</u>
7) Kelebihan penyeteroran ke kasda (6) - (5) - (4)	Rp	3.755.310.663,22

5.1.26 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp120.542.995.380,55 dan Rp106.477.370.040,87 adalah jumlah kekayaan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam bentuk Aset Lancar berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, setelah dikurangi dengan Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek. Penjelasan masing-masing pos adalah sebagai berikut.

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2013 sebesar Rp67.430.688.400,67 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama TA 2013. Angka pembentuk SiLPA di Neraca yakni sebagai berikut.

No	Akun Pembentuk SiLPA	Catatan	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	Catatan 5.1.1	63.640.167.309,67
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Catatan 5.1.2	129.842.190,00
2	Pendapatan yang Ditangguhkan	Catatan 5.1.2	(304.472,00)
	Komponen Kas di Bendahara Pengeluaran		
3	Kas di BLUD	Catatan 5.1.4	3.732.660.946,00
4	Hutang PFK	Catatan 5.1.21	(71.677.573,00)
	Jumlah SiLPA		67.430.688.400,67

Sementara itu, SiLPA per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp66.532.362.969,81.

2. Pendapatan yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp276.592.103,00 (Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp276.287.631,00 (Catatan 5.1.3) + Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp304.472,00 (Catatan 5.1.2)) dan Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.802.163,00. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan

pendapatan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah hingga akhir tahun buku.

3. Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar dan Rp50.776.337.123,43 dan Rp38.536.479.027,00. Cadangan Piutang tersebut merupakan pasangan perkiraan Piutang.

4. Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp6.152.548.597,00 dan Rp5.678.602.202,00. Cadangan Persediaan tersebut merupakan pasangan perkiraan Persediaan yang dilaporkan masing-masing SKPD.

5. Cadangan Belanja Dibayar di Muka

Jumlah Cadangan Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp72.916.666,67 dan Rp147.916.666,67. Cadangan Belanja Dibayar di Muka tersebut merupakan pasangan perkiraan Belanja Dibayar di Muka.

6. Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp4.166.087.510,22 dan Rp4.425.792.987,61. Merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai utang kepada Pihak Ketiga (PPK), yang pembayarannya dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran berikutnya.

5.1.27 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp2.397.676.378.570,76 dan sebesar Rp2.203.195.953.242,76. Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam bentuk Investasi Jangka Panjang berupa penyertaan modal pada tiga perusahaan daerah, pemilikan aset tetap dan aset lainnya berupa dana bergulir. Penjelasan masing-masing pos adalah sebagai berikut.

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Jumlah yang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp47.132.103.970,26 dan Rp41.646.803.970,26 merupakan dana Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi nonpermanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2.311.458.781.301,50 dan sebesar Rp2.122.463.655.973,50. Merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam bentuk Aset Tetap.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp39.085.493.299,00 dan sebesar Rp39.085.493.299,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam bentuk Aset Lainnya.

5.1.28 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2013 adalah sebesar Rp11.526.643.040,00 atau 91,70% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp12.569.922.740,00. Sedangkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp7.970.439.879,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp3.556.203.161 (Rp11.526.643.040,00 - Rp7.970.439.879,00) atau naik 44,62% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian Pendapatan Pajak Daerah yakni sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Pajak Hotel	384.050.000,00	456.615.251,00	118,89	282.258.213,00
Pajak Restoran	67.057.500,00	138.941.845,00	207,20	17.620.000,00
Pajak Hiburan	19.650.000,00	19.524.280,00	99,36	4.700.000,00
Pajak Reklame	165.405.000,00	168.909.000,00	102,11	152.460.877,00
Pajak Penerangan Jalan	7.500.000.000,00	7.936.644.441,00	105,82	6.983.463.604,00
Pajak Air Tanah	350.000.000,00	306.031.200,00	87,43	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	233.760.240,00	108.763.750,00	46,52,00	174.384.018,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	350.000.000,00	168.258.025,00	48,07	355.553.167,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	2.222.955.248,00	63,51	0,00
Jumlah	12.569.922.740,00	11.526.643.040,00	91,70	7.970.439.879,00

5.1.29 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2013 adalah sebesar Rp10.927.224.401,00 atau 86,16% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp12.682.354.760,00. Sedangkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp8.867.023.813,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp2.060.200.598,00 (Rp10.927.224.401,00 - Rp8.867.023.813,00) atau naik 23,23%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Retribusi Jasa Umum	6.522.704.000,00	5.030.567.375,00	77,12	1.563.935.205,00
Retribusi Jasa Usaha	3.407.810.000,00	3.190.688.100,00	93,62	4.150.670.550,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.751.840.760,00	2.705.968.926,00	98,33	3.152.418.058,00
Jumlah	12.682.354.760,00	10.927.224.401,00	86,16	8.867.023.813,00

Rincian Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.576.204.000,00	2.838.489.375,00	62,03	76.197.205,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	140.483.000,00	140,48	119.757.000,00
Retribusi Pelayanan Biaya KTP dan Akte Capil	1.200.000.000,00	1.457.505.000,00	121,46	723.830.000,00
Retribusi Pemeriksaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.000.000,00	3.700.000,00	370,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	525.000.000,00	462.933.000,00	88,17	549.060.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	113.374.000,00	113,37	94.341.000,00
Retribusi Penggantian Cetak Peta	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
Retribusi Jasa Ketata Usahaan/ Leges	0,00	135.000,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.500.000,00	2.050.000,00	136,67	750.000,00
Retribusi Tera Ulang	10.000.000,00	2.898.000,00	28,98	0,00
Jumlah	6.522.704.000,00	5.030.567.375,00	77,12	1.563.935.205,00

Rincian Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	869.000.000,00	843.623.000,00	97,07	609.024.500,00
Retribusi Tempat Pelelangan	35.000.000,00	35.287.500,00	100,82	32.787.500,00
Retribusi Terminal	200.660.000,00	150.800.000,00	75,15	160.000.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	169.500.000,00	201.368.000,00	118,80	165.271.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	120.150.000,00	135.650.000,00	112,90	138.155.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.009.000.000,00	1.822.959.600,00	90,74	3.042.732.550,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4.500.000,00	1.000.000,00	22,22	2.700.000,00
Jumlah	3.407.810.000,00	3.190.688.100,00	93,62	4.150.670.550,00

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.684.448.760,00	1.661.403.726,00	98,63	1.726.077.058,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	895.142.000,00	884.242.000,00	98,78	1.288.976.000,00
Retribusi Izin Trayek	110.000.000,00	134.870.000,00	122,60	115.840.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	30.000.000,00	18.625.000,00	62,08	21.525.000,00
Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi izin Usaha Perdagangan	0,00	5.975.000,00	0,00	0,00
Retribusi izin Usaha Pertambangan dan Energi	0,00	353.200,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	31.500.000,00	500.000,00	1,58	0,00
Jumlah	2.751.840.760,00	2.705.968.926,00	98,33	3.152.418.058,00

5.1.30 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2013 adalah sebesar Rp6.200.569.326,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2012 sebesar Rp4.885.496.186,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2012 lebih

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tinggi sebesar Rp1.315.073.140,00 (Rp6.200.569.326,00 - Rp4.885.496.186,00) atau naik 26,92% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
BPD Sulawesi Tenggara	6.200.569.326,00	6.200.569.326,00	100,00	4.885.496.186,00
PDAM Kolaka Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
PD Aneka Usaha Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00
PD BPR Bahteramas Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.200.569.326,00	6.200.569.326,00	100,00	4.885.496.186,00

5.1.31 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2013 adalah sebesar Rp19.456.471.680,86 atau 127,52% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp15.257.226.436,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp18.777.122.610,98. Hal ini berarti realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp679.349.069,88 atau naik 3,62% (Rp19.456.471.680,86 - Rp18.777.122.610,98) dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	775.000.000,00	800.570.450,00	672.471.650,00
Penerimaan Jasa Giro/Bagi Hasil	3.477.226.436,00	4.054.963.150,86	3.742.816.260,98
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.192.713.547,00	1.881.273.831,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah	5.000.000,00	35.307.049,00	6.814.808,00
Pendapatan dari Badan / Lembaga (BLUD)	10.000.000.000,00	13.372.917.484,00	10.834.462.201,00
Pendapatan dari AKPER	0,00	0,00	356.047.730,00
Pendapatan Kompensasi PPh	0,00	0,00	1.283.236.130,00
Jumlah	15.257.226.436,00	19.456.471.680,86	18.777.122.610,98

5.1.32 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2013 adalah sebesar Rp 34.420.012.764,00 atau 111,39% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp30.900.606.550,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp38.229.608.857,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2013 lebih rendah sebesar Rp3.809.596.093,00 (Rp34.420.012.764,00 - Rp38.229.608.857,00) atau turun 9,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	25.000.000.000,00	29.982.496.452,00	119,92	33.804.078.766,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)	5.900.606.550,00	4.437.516.312,00	75,20	3.944.060.860,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21				
Penerimaan Retribusi PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Alokasi Kurang Bayar BPHTB Tahun 2010	0,00	0,00	0,00	481.469.231,00
Jumlah	30.900.606.550,00	34.420.012.764,00	111,39	38.229.608.857,00

5.1.33 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil SDA TA 2013 adalah sebesar Rp54.836.053.035,00 atau 133,48% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp41.083.228.267,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp40.958.802.813,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Bagi Hasil SDA TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp13.877.250.222,00 (Rp54.836.053.035,00 - Rp40.958.802.813,00) atau naik 33,88% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Pendapatan Bagi Hasil SDA terdiri dari Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Iuran Tetap Landrent, Bagi Hasil Eksploitasi, dan Iuran Eksploitasi (Royalti) dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	74.881.130,00	121.735.026,00	162,57	217.730.773,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)	322.190.400,00	1.343.133.258,00	416,88	479.730.657,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	40.283.755.900,00	52.657.304.799,00	130,71	39.917.355.164,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	289.738.431,00	347.408.873,00	119,90	343.986.219,00
Dana Jaminan Reboisasi	112.662.406,00	366.471.079,00	325,28	0,00
Jumlah	41.083.228.267,00	54.836.053.035,00	133,48	40.958.802.813,00

5.1.34 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)

Akun ini menampung pendapatan dana alokasi umum bagi pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37 s.d.Pasal 49. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2013 adalah sebesar Rp613.742.503.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp613.742.503.000,00. Realisasi DAU TA 2012 sebesar Rp535.098.526.000,00, sehingga Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp78.643.977.000,00 (Rp613.742.503.000,00 - Rp535.098.526.000,00) atau naik 14,70% dibandingkan dengan realisasi TA 2012.

5.1.35 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2013 adalah sebesar Rp60.384.490.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan TA 2013 sebesar Rp60.384.490.000,00 sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp52.618.840.000,00. Artinya, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp7.765.650.000,00 (Rp60.384.490.000 - Rp52.618.840.000,00) atau naik 14,76% dibandingkan dengan realisasi TA 2012.

5.1.36 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian TA 2013 adalah sebesar Rp69.466.933.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp69.466.933.000,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp80.551.449.000,00. Hal ini berarti Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian TA 2013 lebih rendah sebesar Rp11.084.516.000,00 (Rp69.466.933.000,00 - Rp80.551.449.000,00) dibandingkan dengan realisasi TA 2012 atau turun 13,76%. Rincian Transfer Pemerintah Pusat lainnya-Dana Penyesuaian TA 2012 adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Dana Tunjangan Profesi Guru	63.847.933.000,00	63.847.933.000,00	54.127.709.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	5.619.000.000,00	5.619.000.000,00	5.193.000.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	21.230.740.000,00
Jumlah	69.466.933.000,00	69.466.933.000,00	80.551.449.000,00

5.1.37 Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2013 adalah sebesar Rp24.441.493.327,00 atau 122,96% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp19.878.336.370,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp14.094.387.169,00. Hal ini berarti Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2012 lebih tinggi sebesar Rp10.347.106.158,00 (Rp24.441.493.327,00 - Rp14.094.387.169,00) atau naik 73,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2013 adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.990.921.222,00	3.062.367.550,00	102,39	1.750.662.436,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.501.965.419,00	6.676.227.168,00	121,34	5.431.982.579,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.385.449.729,00	14.248.616.794,00	125,15	6.911.742.154,00
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	454.281.815,00	100,00	0,00
Jumlah	19.878.336.370,00	24.441.493.327,00	122,96	14.094.387.169,00

5.1.38 Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Retribusi Daerah

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2013 adalah sebesar Rp313.827.010,00 atau 99,99% dari target yang

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp313.828.010,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp262.689.846,00. Hal ini berarti Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2012 lebih tinggi sebesar Rp51.137.164,00 (Rp313.827.010,00 - Rp262.689.846,00) atau naik 19,47% dibandingkan dengan realisasi TA 2012.

5.1.39 Transfer Pemerintah Provinsi- Lainnya.

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-Lainnya TA 2013 adalah sebesar Rp3.660.000.000,00 atau 61,12% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp5.988.612.000,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp3.158.612.000,00. Hal ini berarti Transfer Pemerintah Provinsi-Lainnya TA 2012 lebih tinggi sebesar Rp501.388.000,00 (Rp3.660.000.000,00 - Rp3.158.612.000,00) atau naik 15,87% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Bantuan Kesehatan JAMKESMAS	108.612.000,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Penanggulangan Bencana Alam	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
Dana Block Grant Kecamatan dan Kelurahan	4.380.000.000,00	2.160.000.000,00	49,31	3.158.612.000,00
Jumlah	5.988.612.000,00	3.660.000.000,00	61,12	3.158.612.000,00

5.1.40 Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya pada tahun 2013 adalah sebesar: Rp4.976.500.000,00 atau 57,63 % dari target yang direncanakan pada APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp8.635.000.000,00. Realisasi TA 2012 sebesar Rp26.329.496.576,00. Hal ini berarti realisasi TA 2013 lebih rendah sebesar Rp21.352.996.576,00 (Rp4.976.500.000,00 - Rp26.329.496.576,00) atau turun sebesar 81,10% dibandingkan dengan realisasi TA 2012

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Pendapatan dari Penerimaan IUP OPR	8.635.000.000,00	4.976.500.000,00	57,63	25.263.988.460,00
Pendapatan dari AKPER	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.065.508.116,00
Jumlah	8.635.000.000,00	4.976.500.000,00	57,63	26.329.496.576,00

5.1.41 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 adalah sebesar Rp489.121.625.195,00 atau 95,66% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp511.316.978.228,81, sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp443.182.517.481,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp45.939.107.714,00 (Rp489.121.625.195,00 - Rp443.182.517.481,00) atau naik 10,37% dibandingkan dengan realisasi TA 2012.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%
Gaji dan Tunjangan	447.652.095.837,81	431.541.924.272,00	96,40
Tambahan Penghasilan PNS	5.778.000.000,00	4.582.750.000,00	79,31
Balanza Penunjang Pimpinan & Anggota DPRD, KDH, WKDH	2.064.000.000,00	1.838.800.000,00	89,09
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	577.121.516,00	577.121.516,00	100,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	625.507.037,00	527.684.587,00	84,36
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	436.907.538,00	353.318.155,00	80,86
Insentif Pemungutan PAD	3.613.600,00	0,00	0,00
Honorarium PNS	30.804.414.700,00	27.596.614.147,00	89,59
Honorarium Non PNS	15.493.363.000,00	14.835.982.500,00	95,75
Uang Lembur	1.673.806.000,00	1.210.816.750,00	72,34
Honorarium Pengelola Dana Bos	42.600.000,00	42.600.000,00	100,00
Insentif	5.324.549.000,00	5.181.648.271,00	97,32
Belanja Operasional Bandar Udara	263.400.000,00	255.600.000,00	97,04
Belanja Operasional Penagihan	563.000.000,00	562.164.997,00	99,85
Belanja Uang Saku	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00
Jumlah	511.316.978.228,81	489.121.625.195,00	95,66

5.1.42 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2013 adalah sebesar Rp166.460.307.480,00 atau 93,53% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp177.972.715.276,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp146.319.376.076,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp20.140.931.404,00 (Rp166.460.307.480,00 - Rp146.319.376.076,00) atau naik 13,77% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%
Belanja Bahan Pakai Habis	6.869.868.053,00	6.292.759.055,00	91,58
Belanja Bahan/Material	18.935.198.926,00	18.009.996.091,00	95,11
Belanja Jasa Kantor	12.131.550.932,00	11.135.655.010,00	91,78
Belanja Premi Asuransi	200.800.000,00	200.800.000,00	100,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.586.874.160,00	7.786.819.164,00	90,68
Belanja Cetak dan Penggadaan	5.443.224.559,00	5.029.409.993,00	92,39
Belanja Sewa Rumah/ Gedung / Gudang/ Parkir	1.038.827.500,00	792.444.378,00	76,28
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	340.025.000,00	283.913.500,00	83,50
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	943.320.000,00	931.520.000,00	98,75
Belanja Makan dan Minum	8.186.217.750,00	7.492.258.244,00	91,52
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.669.629.710,00	1.585.038.000,00	94,93
Belanja Pakaian Kerja	467.768.000,00	467.768.000,00	100,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	427.680.000,00	419.730.000,00	98,14
Belanja Perjalanan Dinas	70.770.242.245,00	66.090.095.530,00	93,38
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	160.000.000,00	158.561.000,00	99,10

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.142.098.400,00	2.641.652.700,00	84,34
Belanja Pemeliharaan	5.075.326.130,00	4.831.282.856,00	95,19
Belanja Jasa Konsultansi	2.445.388.500,00	2.443.815.500,00	99,94
Belanja Barang dan Jasa Dana Bos	40.500.000,00	40.000.000,00	98,77
Belanja Jasa penunjang Kegiatan kelembagaan Masyarakat	9.757.945.344,00	9.230.762.144,00	94,60
Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.080.000,00	7.830.000,00	77,68
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	875.750.000,00	612.062.500,00	69,89
Belanja Pendidikan Non PNS	292.020.000,00	292.020.000,00	100,00
Belanja Pengadaan Buku/Kepustakaan	38.655.000,00	36.000.000,00	93,13
Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA	3.810.850.000,00	3.668.059.510,00	96,25
Belanja Klaim	4.200.000.000,00	4.198.922.000,00	99,97
Belanja Barang dan Jasa Badan/Lembaga	12.112.875.067,00	11.781.132.305,00	97,26
Jumlah	177.972.715.276,00	166.460.307.480,00	93,53

Dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa terdapat kesalahan klasifikasi pada anggaran dan realisasi Belanja Barang Jasa yaitu adanya biaya bantuan rumah ibadah, bantuan organisasi keagamaan, kegiatan TMMD, dan ekspedisi NKRI sebesar Rp3.300.000.000,00 yang dikeluarkan dalam bentuk tunai yang realisasinya bukan dari SKPKD. Belanja tersebut seharusnya diklasifikasikan pada belanja hibah. Selain itu terdapat juga belanja barang jasa berupa pemberian beasiswa D3 kepada non PNS sebagai bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu sebesar Rp192.020.000,00 yang seharusnya diklasifikasikan dalam belanja bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Kolaka juga telah merealisasikan belanja modal kepada sekolah swasta sebesar Rp1.489.832.475,00 yang seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja barang jasa karena dimaksudkan untuk diserahkan ke masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan perkiraan Belanja Barang Jasa disajikan terlalu tinggi sebesar Rp2.002.187.525,00.

5.1.43 Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga TA 2013 adalah sebesar Rp0,00 dan TA 2012 Rp461.789.029,00 atau 92,36% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2012 sebesar Rp500.000.000,00. Belanja bunga tersebut merupakan pembayaran Utang Bunga dari pinjaman IBRD Loan No.4105-IND tanggal 15 Januari 1997, Perjanjian SLA No.1075/DP3/1998 tanggal 3 Juli 1998.

5.1.44 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2013 adalah sebesar Rp28.771.228.750,00 atau 81,58% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp35.267.536.000,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp3.947.656.500,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Hibah TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp24.823.572.250,00 (Rp28.771.228.750,00 - Rp3.947.656.500,00) atau naik 628,82% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2013 adalah sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Keterangan	Nilai
1	Belanja Hibah Kepada Kejaksaan Negeri Kolaka	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Pengadilan Negeri	150.000.000,00
3	Belanja Hibah Kepada KODIM	350.000.000,00
4	Belanja Hibah Kepada POLRES	150.000.000,00
5	Belanja Hibah Kepada BNN	498.384.150,00
6	Belanja Hibah Kepada Yonif 725	50.000.000,00
7	Belanja Hibah Kepada TNI AL	15.000.000,00
8	Belanja Hibah Kepada POM	165.000.000,00
9	Belanja Hibah Kepada Rutan Kolaka	50.000.000,00
10	Belanja Hibah Kepada PMI Kolaka	100.000.000,00
11	Belanja Hibah Kepada KNPI	150.000.000,00
12	Belanja Hibah Kepada PWI Kolaka	100.000.000,00
13	Belanja Hibah Kepada PRAMUKA	150.000.000,00
14	Belanja Hibah Kepada KPUD	15.485.308.600,00
15	Belanja Hibah Kepada PANWASLU	2.500.000.000,00
16	Belanja Hibah Kepada Pengamanan Pemilikada (POLRES)	2.813.536.000,00
17	Belanja Hibah Kepada DOB Kabupaten Kolaka Timur	3.500.000.000,00
18	Belanja Hibah Kepada Nurul Sholihin Kolaka	100.000.000,00
19	Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kolaka	200.000.000,00
20	Belanja Hibah Kepada PGRI	100.000.000,00
21	Belanja Hibah Kepada PEPABRI	40.000.000,00
22	Belanja Hibah Kepada Yayasan Nurul Amin Kolaka	50.000.000,00
23	Belanja Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Kolaka	150.000.000,00
24	Belanja Hibah Kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	50.000.000,00
25	Belanja Hibah Kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUD) Kolaka	200.000.000,00
26	Belanja Hibah Kepada Pesantren Al-Buchari Kolaka	380.000.000,00
27	Belanja Hibah Kepada Pengamanan Tertutup Pemilikada (KODIM)	750.000.000,00
28	Belanja Hibah Kepada AYU Record Kolaka	100.000.000,00
29	Belanja Hibah Kepada Kementrian Agama RI Kolaka Transport Jamaah Haji Kolaka	309.000.000,00
30	Belanja Hibah Kepada DEKRANAS Kolaka	115.000.000,00
31	Belanja Hibah Kepada Provinsi Sultra (Sewa Gedung Menara Global Jakarta)	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Keterangan	Nilai
	Jumlah	28.771.228.750,00

Dalam realisasi Belanja Hibah terdapat kesalahan klasifikasi pada anggaran dan realisasi Belanja Hibah yaitu adanya biaya bantuan rumah ibadah, bantuan organisasi keagamaan, kegiatan TMMMD, dan ekspedisi NKRI sebesar Rp3.300.000.000,00 yang dikeluarkan dalam bentuk tunai yang realisasinya bukan dari SKPKD. Belanja tersebut seharusnya diklasifikasikan pada belanja hibah. Permasalahan tersebut mengakibatkan perkiraan Belanja Hibah disajikan terlalu rendah sebesar Rp3.300.000.000,00.

5.1.45 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013 adalah sebesar Rp3.538.905.000,00 atau 99,69% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp3.550.000.000,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp3.080.250.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp458.655.000,00 (Rp3.538.905.000,00 - Rp3.080.250.000,00) atau naik 14,89% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Belanja Bantuan PNPM Pedesaan	1.405.000.000,00	1.405.000.000,00	100,00	2.082.500.000,00
Belanja Bantuan BLM PNPM Perkotaan	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	97.500.000,00
Belanja Bantuan PLPBK PNPM Perkotaan	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan kepada Akper / Beasiswa Mahasiswa Keluarga tdk mampu	139.125.000,00	130.380.000,00	93,71	0,00
Belanja Bantuan kepada Seni Tarian Kuda Lumping	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	00,00
Belanja Bantuan Sosial yang tidak di Rencanakan	1.330.875.000,00	1.328.525.000,00	99,82	113.000.000,00
Jumlah	3.550.000.000,00	3.538.905.000,00	99,69	3.080.250.000,00

Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013 dapat dilihat pada **lampiran 17**

Dalam realisasi Belanja Bantuan Sosial terdapat kesalahan klasifikasi pada anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial yaitu Belanja Barang Jasa berupa pemberian beasiswa D3 kepada non PNS sebagai bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu sebesar Rp192.020.000,00 yang seharusnya diklasifikasikan dalam Belanja Bantuan Sosial. Permasalahan tersebut

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengakibatkan perkiraan Belanja Bantuan Sosial disajikan terlalu rendah sebesar Rp192.020.000,00.

5.1.46 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2013 adalah sebesar Rp185.388.769.673,00 atau 93,63% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp198.002.377.924,00. Sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp175.626.541.194,00. Hal ini berarti Belanja Modal TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp9.762.228.479,00 (Rp185.388.769.673,00 - Rp175.626.541.194,00) atau naik 5,56% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
Tanah	7.768.445.000,00	5.875.145.000,00	75,63	3.836.550.200,00
Peralatan & Mesin	29.149.395.631,00	27.715.919.383,00	95,08	31.972.389.980,00
Gedung dan Bangunan	88.836.586.999,00	81.584.449.089,00	91,84	90.065.441.664,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.202.340.294,00	70.181.176.201,00	97,20	49.602.353.050,00
Aset Tetap Lainnya	45.610.000,00	32.080.000,00	70,34	149.806.300,00
Jumlah	198.002.377.924,00	185.388.769.673,00	93,63	175.626.541.194,00

Dalam realisasi Belanja Modal terdapat kesalahan klasifikasi pada anggaran dan realisasi Belanja Modal yaitu Belanja Modal kepada sekolah swasta sebesar Rp1.489.832.475,00 yang seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Barang Jasa karena dimaksudkan untuk diserahkan ke masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan perkiraan Belanja Barang Modal disajikan terlalu tinggi sebesar Rp1.489.832.475,00.

5.1.47 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2013 adalah sebesar Rp1.814.158.055,00 atau 90,71 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2012 sebesar Rp443.045.000,00. Hal ini berarti Belanja Tidak Terduga TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp1.371.113.055,00 (Rp1.814.158.055,00 - Rp443.045.000,00) atau turun 309,47% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2013 adalah sebagai berikut.

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Tak terduga kepada BPBD kab. Kolaka dalam rangka pembangunan Bronjong Sungai Rina desa Ulu Lapao Pao Kec. Wolo TA 2013	569.900.000,00
2	Belanja Tak Terduga Pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pemasangan Bronjong Sungai Balandete Kec Kolaka Kab Kolaka TA 2013	499.670.000,00
3	Belanja Tak Terduga Pada SKPD kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan Tanggul Sungai Balandete Kec. Kolaka, Kab Kolaka TA 2013	544.588.055,00
4	Belanja Tak Terduga kepada DISHUBKOMINFO Kab. Kolaka, dalam rangka Penimbunan dan pengerasan Areal Gedung PKP - PK Bandar Udara Sangia Ni Bandera TA 2013	200.000.000,00
Jumlah		1.814.158.055,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.48 Transfer Lainnya-Bantuan Keuangan.

Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp28.573.601.000,00 atau 92,99% dari jumlah yang dianggarkan pada APBD Perubahan sebesar Rp30.726.366.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan ke Desa (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp28.201.000.000,00 atau 93,06 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp30.303.200.000,00 dan realisasi bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp372.601.000,00 atau 88,05% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp423.166.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2012 sebesar Rp18.850.365.800,00. Hal ini berarti realisasi Bantuan Keuangan TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp9.723.235.200,00 (Rp28.573.601.000,00- Rp18.850.365.800,00) atau naik 51,58% dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik TA 2013 adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional	67.835.000,00	67.835.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan pembangunan	54.846.000,00	54.846.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura	27.414.000,00	27.414.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Peduli Rakyat Nasional	29.765.000,00	29.765.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKS	28.181.000,00	28.181.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar	31.518.000,00	31.518.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PNBK	38.725.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	53.237.000,00	53.237.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Pembaruan	20.376.000,00	20.376.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Bulan Bintang	14.699.000,00	14.699.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	15.505.000,00	15.505.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Penegak Demokrasi Indonesia	8.273.000,00	8.273.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Kebangsaan	13.478.000,00	13.478.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Bintang Reformasi	11.840.000,00	0,00	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Buruh	7.474.000,00	7.474.000,00	100,00
Jumlah	423.166.000,00	372.601.000,00	88,05

5.1.49 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2013 adalah sebesar Rp66.546.562.969,81 atau 100,02% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp66.532.362.969,81. Sedangkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2012 sebesar Rp31.364.465.900,83. Hal ini berarti realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp35.182.097.068,98 (Rp66.546.562.969,81- Rp31.364.465.900,99) atau naik 112,17% dari TA 2012.

Penerimaan Pembiayaan TA 2013 dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp66.532.362.969,81. SiLPA tersebut merupakan sisa kas di Kas Daerah TA 2012 sebesar Rp63.409.966.148,81, sisa kas di BLUD sebesar Rp2.992.675.067,00, sisa kas pada Bendahara Pengeluaran TA 2011 sebesar Rp61.546.333,00 dan sisa kas pada bendahara pengeluaran TA 2012 sebesar Rp68.175.421,00.

Penerimaan Pembiayaan TA 2013 terdiri dari penggunaan SiLPA sebesar Rp66.532.362.969,81 dan penerimaan kembali dana bergulir sebesar Rp14.200.000,00.

5.1.50 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2013 adalah sebesar Rp 9.800.000.000,00 atau 100 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2013 sebesar Rp9.800.000.000,00. Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2012 sebesar Rp4.723.056.601,00. Hal ini berarti realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2013 lebih tinggi sebesar Rp5.076.943.399,00 (Rp 9.800.000.000,00- Rp4.723.056.601,00) atau naik 107,49% dari TA 2012.

Pengeluaran Pembiayaan TA 2013 terdiri dari Penyertaan Modal Pemkab Kolaka kepada PDAM sebesar Rp4.300.000.000,00 dan kepada BPD sebesar Rp5.500.000.000,00.

5.1.51 Kiriman Uang Masuk dan Kiriman Uang Keluar

Kiriman Uang Masuk dan Kiriman Uang Keluar adalah merupakan transaksi pindah buku dari rekening kas daerah penerimaan ke rekening kas daerah pengeluaran yang disajikan dalam Laporan Arus Kas sebesar Rp897.009.666.729,00

5.1.52 Penjelasan Selisih Laporan Realisasi Anggaran Dengan Laporan Arus Kas

Terdapat perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Arus Kas (LAK) dengan rincian sebagai berikut.

No	Akun	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)
1	Lain-lain PAD yang sah	19.456.471.680,86	6.083.554.196,86	13.372.917.484,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Belanja Barang	166.460.307.480,00	154.679.175.175,00	11.781.132.305,00
3	Belanja Modal	185.388.769.673,00	184.536.970.373,00	851.799.300,00

Selisih tersebut disebabkan Penerimaan BLUD RS Benyamin Guluh yang dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah dan belanja BLUD RS Benyamin Guluh yang berasal dari transaksi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dikeluarkan dari LAK.

5.2 Penjelasan dan Rincian Pos-Pos Non Laporan Keuangan

5.2.1 Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang

Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi wajib dilaksanakan secepatnya dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Program reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup program pemulihan untuk kurun waktu lima tahun yang dirinci setiap tahun meliputi lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk *back filling*, *revegetasi*, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan, dan rincian biaya reklamasi.

Bupati Kolaka telah menerbitkan 4 IUP Eksplorasi dan 25 IUP Proses Produksi Nikel dengan luas 27.284,60 Ha. Dari 27.284,60 Ha tersebut, pemegang IUP Produksi telah melakukan produksi pertambangan nikel dengan lahan terbuka minimal seluas 620,44 Ha. Luas lahan terbuka tersebut merupakan data dari Pemegang IUP pada saat pengawasan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka. Sampai dengan 31 Desember 2013, Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang yang telah disetor oleh Pemegang IUP, yakni sebagai berikut.

No	Pemegang IUP	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
1	PT Darma Rosadi Int. (WSPM 010)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	1.305.562.177,00
2	PT Putra Mekongga S. (WSPM 001)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	1.518.425.072,00
3	PT Bola Dunia Mandiri (WSPM 004)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	375.000.000,00
4	PD Aneka Usaha (WSPM 003)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	2.017.593.200,00
5	PT Waja Inti Lestari (WUWL 003)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	150.704.230,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Pemegang IUP	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
6	PT Tambang Rezeki K (WSPM 013)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	1.513.931.636,00
7	PT Darma Bumi Kendari (KWPM Z1)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	378.077.125,00
8	PT Sumber Setia Budi (WSTG 017)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	600.000.000,00
9	PT Pernik Sultra (WSTG 007)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	1.203.705.588,00
10	PT Akar Mas Ind (WSPM 011)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	1.516.443.321,00
11	PT Wijaya Nikel N. (WSPM 016)	Penyetoran ke Rekening Bank a.n. Pemda Kolaka (Distamben)	225.000.000,00
Jumlah			10.804.442.349,00

5.3 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan TA 2013 adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dimana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dianut dengan sistem basis kas dan untuk aset, kewajiban dan ekuitas dianut dengan sistem basis akruaI.

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Kolaka

6.1.1 Sejarah Singkat Terbentuk

1. Sebelum Tahun 1905

Asal muasal Kerajaan Mekongga daerah yang saat ini dikenal sebagai Kabupaten Kolaka mulai terbentuk, adalah hal pembicaraan sejarah yang didapatkan dari tuturan secara turun temurun dari komunitas Tolaki yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka sejak dulu hingga sekarang. Proses asal dan terbentuknya Kerajaan Mekongga diilhami oleh suatu rangkaian dengan datangnya dua orang bersaudara kandung mengendarai sarung sakti (*Toloa Sarungga*). Dua orang bersaudara ini tiba disuatu bukit yang bernama Kolumba yang berada dalam kawasan pegunungan Balandete. Kedua orang bersaudara ini adalah *Larumbalangi* dan *Wekoila*. Proses selanjutnya *Larumbalangi* (*Sangia Wonua*) meletakkan dasar-dasar terbentuknya Kerajaan Mekongga yang berpusat di Wundulako dan saudaranya *Wekoila* melanjutkan perjalanan kewilayah Konawe kemudian dipersunting oleh *Ramandalangi*. Kedua saudara kandung tersebut dianggap sebagai aktor pertama dalam proses meletakkan dasar-dasar penting sebagai Pemimpin Negeri atau *Anakiano Wonua*.

Pada masa awal datangnya *Larumbalangi*, masyarakat Mekongga yang mendiami wilayah dipimpin oleh para *Pu'utobu* atau *Tonomotuo*, pada zaman itu masyarakat Mekongga selalu mendapat gangguan dari seekor burung besar (elang raksasa) yang bahasa daerah disebut *Konggoaha*. Dengan petunjuk strategi dari *Larumbalangi*, maka burung tersebut dapat terbunuh oleh bambu runcing (*Osungga*) yang dipasang oleh masyarakat penghuni Tobu dan tombak (*Kasai*) yang dipegang oleh Kesatria yang menjadi umpan Kongga yang bernama *Tasahea* dari *Loea* dan yang terakhir oleh keris Sakti *Larumbalangi* sendiri. Dengan terbunuhnya burung Kongga disambut luapan kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat sehingga para *Pu'utobu* atau *Tonomotuo* kemudian menyatakan ikrar untuk mengangkat *Larumbalangi* sebagai pemimpin, kerabatnya *Wasabenggali* dipercaya untuk melakukan prosesi pengukuhan (*Mombotonggo*) sebagai Raja Mekongga pada akhir abad ke-13 (Tahun 1290).

2. Tahun 1905 s.d. 1942

Dengan masuknya Belanda di Kerajaan Mekongga pada Tahun 1905, maka Raja Mekongga yang saat itu diperintah oleh *Bokeo Bula*, langsung mengadakan perlawanan dibantu oleh *Mambulo*, *Latambaga*, *Pombili*, *H. Hasan* dan *Tojabi*. Karena peralatan perang yang tidak seimbang maka raja Mekongga beserta pengikutnya mengungsi ke daerah pedalaman Kolaka Utara, *Rate-rate*, *Ueesi* dan *Mowewe* untuk mempersiapkan perlawanan. Dengan mundurnya *Bokeo Baula* otomatis masyarakat Mekongga kehilangan raja sebagai figur pemimpin mereka, maka tanggal 23 Maret 1906 *Sara Wonua* yang terdiri dari 7 (tujuh) *Tonomotuo* bermusyawarah dan berhasil memilih dan mengukuhkan *Bokeo Latambaga* sebagai raja Mekongga. Karena Kolaka adalah bagian *Swapraja Luwu*, maka untuk mengkoordinasi daerah ini *Datu Luwu* menempatkan seorang

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

duta/pejabat selaku pembantu datu dengan sebutan *Sulewatang Ngapa*. Setelah Raja Mekongga (*Bokeo Latambaga*) meninggal pada 25 Desember 1932, maka tidak ada lagi pengganti raja yang dikukuhkan secara sah oleh *Sara Wonua* (7 Tonomotuo) karena *Sara Wonua* telah dilebur menjadi Kepala Kampung (Kepala).

Pada Tahun 1933 Juru Tulis Bokeo yang bernama *Indumo* ditunjuk oleh Belanda sebagai pelaksana Bokeo dan juga sebagai *Sulewatang Ngapa*.

3. Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942 s.d 1945

Pergeseran kekuasaan Belanda ke tangan Pemerintah Jepang tidak membawa akibat perubahan Struktural Pemerintahan di daerah-daerah, namun demikian istilah *residen*, *Afdeeling* dan *Onderafdeeling* diubah menjadi *Menseibu*, *Ken* dan *Bunken*. Mengingat perhubungan darat yang lebih dekat antara Kolaka dan Kendari, dibandingkan antara Kolaka dengan Palopo melalui laut, maka Kolaka Bunken dimasukkan ke dalam taktis Kendari Bunken yaitu hanya dalam rangka tugas-tugas Pemerintahan Umum, sedangkan menyangkut tugas-tugas Swapraja tetap berhubungan dengan Swapraja Luwu di Palopo.

4. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945 s.d. 1960

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, maka Daerah Kolaka yang pertama di Sulawesi Tenggara menyatakan diri sebagai Wilayah *De Fakto* Republik Indonesia dengan *Ngapa* selaku Petor/Kepala Pemerintahan RI di Daerah Kolaka. Untuk menjadikan Kolaka dari status Kewedanaan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II adalah melalui perjuangan rakyat Kolaka yakni pada 24 Agustus 1951 di dalam suatu pertemuan di Kendari yang diadakan oleh Kepala *Afdeeling* Buton dan *Laiwoi* dengan pemerintahan-pemerintahan setempat dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi Tenggara yang dimaksudkan untuk menentukan dimana sebaiknya kedudukan Ibukota Negeri Sulawesi Tenggara, karena waktu itu Butonlah yang menjadi Ibukota Negeri. Kesimpulan pertemuan adalah bahwa Kolaka dan Kendari menuntut kabupaten tersendiri, sehingga di Sulawesi Tenggara akan dibentuk 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Buton/Muna dan Kabupaten Kolaka/Kendari. Untuk maksud ini dibentuk panitia pembentukan Kabupaten Kolaka/Kendari.

Proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kolaka/Kendari tiba-tiba mengalami perkembangan baru dengan tuntutan yang baru dari Kolaka untuk berdiri sendiri sebagai satu kabupaten terlepas dari Kabupaten Kendari/Kolaka. Akhirnya pada bulan September 1959 terdengarlah pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Makassar Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi dimana Kolaka menjadi salah satu Kabupaten, di antara 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten yang diumumkan. Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka tersebut terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Kolaka dengan Ibukota Wundulako; Kecamatan Tirawuta dengan Ibukota Rate-Rate; Kecamatan Batu Putih dengan Ibukota Wawo. Dengan undang-undang tersebut ditetapkan pejabat/penguasa sementara Daerah Tingkat II yang baru yaitu Wedana Abunawas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Kolaka.

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, ditetapkan pengangkatan Bupati Kepala Daerah yang pertama dan untuk

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ditunjuk dan diangkat Bapak *Yacob Silondae* sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka. Pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi *Andi Pangerang Pettarani* atas nama Menteri Dalam Negeri pada 29 Pebruari 1960 bertempat di Gedung Nasional Kolaka. Dari pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka tersebut, maka **tanggal 29 Pebruari 1960** merupakan hari jadi Kabupaten Kolaka. Dengan rampungnya pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II di bekas Kabupaten Sulawesi Tenggara, maka sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 / PD tanggal 29 September 1959, Kepala Daerah Sulawesi Tenggara menyerahkan seluruh tugas, kewajiban dan kewenangan kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang baru, maka Resident Koordinator Sulawesi Tenggara tidak lagi mengkoordinir satu kabupaten tetapi mengkoordinir empat Daerah Tingkat II masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Kabupaten Daerah Tingkat II Muna dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, dengan Resident Koordinator Sulawesi Tenggara yang pertama adalah Bapak *Malajon Daeng Liwang*.

Guna merealisasikan lebih lanjut dari pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, tanggal 4 Juli 1959 yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, dan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah Bapak *Yacob Silondae* sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka



yang pertama pada tanggal **29 Pebruari 1960**, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) Bapak *Andi Rivai* melantik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR).

6.1.2 Arti Lambang Daerah

Lambang berbentuk perisai yang dibuat sedemikian rupa, sehingga menyerupai segi lima yang melambangkan Pancasila. Bagian-bagian lambang terdiri dari:

1. Bumi dan langit, melambangkan ruang lingkup hidup dan kehidupan manusia dan makhluk pada umumnya;
2. Burung elang raksasa (Konggaaha/Kongga Owoase) yang melambangkan peristiwa sejarah dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Negeri Mekongga pada zaman dahulu kala;

3. Tugu pahlawan yang melambangkan kepribadian dan kehidupan penduduk Kolaka pada umumnya, yang menunjukkan kepahlawanan dan kepatriotan dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 umumnya dan negeri/daerah serta rakyat Kolaka pada khususnya dari penjajahan Belanda yang dibuktikan dengan peristiwa 19 November 1945;
4. Tanah yakni darat dan laut yang melambangkan keadaan geografis yang penuh dengan kekayaan potensial di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan/hasil laut dan pertambangan;
5. Padi dan kapas adalah lambang kemakmuran yang merupakan cita-cita dan tujuan rakyat dan daerah dalam wilayah RI;
6. Rantai melambangkan persatuan seluruh rakyat dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kolaka;
7. Roda (cakra) adalah lambang masa depan Kabupaten Kolaka yang industrialis;
8. Bintang yang melayang adalah lambang Ketuhanan yang Maha Esa.

6.1.3 Keadaan Daerah

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Kolaka terletak di jazirah Tenggara pulau Sulawesi dan secara geografis terletak pada bagian barat Propinsi Sulawesi Tenggara memanjang dari utara ke selatan berada di sekitar 3°13'-4°35' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara 121°05'-121°99' Bujur Timur yang secara administratif berbatasan dengan

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Kolaka Utara
- ❖ Sebelah Barat : Teluk Bone
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Bombana
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka Timur

2. Topografi

Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka pada umumnya terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan. Diantara gunung dan bukit terbentang dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian dengan tingkat kemiringan pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Tingkat Kemiringan Tanah Pertanian

Kondisi Tanah	Kemiringan	Luas (Ha)	Luas (%)
Datar	0 - 2%	102.493,00	9,94
Landai	2 - 15%	88.051,00	8,84
Bukit	15 - 40%	206.068,00	19,99
Gunung	>40%	634.388,00	61,23
Jumlah		1.031.000,00	100

3. Iklim

Kabupaten Kolaka bersuhu rata - rata antara 24°C - 28°C, dengan suhu terendah 10°C dan suhu tertinggi 31°C. Wilayah daerah basah dengan curah hujan lebih dari 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kolaka, Wolo dan Mowewe dengan bulan basah sekitar 5 sampai 9 bulan dalam setahun. Wilayah daerah kering dengan curah hujan kurang 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Watubangga, Pomalaa, Wundulako, Ladongi dan Tirawuta yang memiliki bulan basah antara 3 sampai 4 bulan dalam setahun.

4. Hidrologi

Kabupaten Kolaka memiliki beberapa sungai yang tersebar pada 20 Kecamatan. Sungai tersebut memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata.

5. Luas Wilayah

Kabupaten Kolaka meliputi wilayah daratan seluas ± 6.918,38 km², dan wilayah perairan laut membentang sepanjang Teluk Bone, seluas 15.000 km². Wilayah Kabupaten Kolaka terbagi dalam 20 Kecamatan, 45 Kelurahan dan 167 Desa.

6. Potensi Pertanian

Potensi dan peluang pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di daerah ini masih sangat memungkinkan dengan memperluas areal dan pengembangan tanaman setelah dimekarkan menjadi 2 kabupaten. Komoditi unggulan pada sektor ini yang telah memperoleh pengakuan masyarakat dan telah terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat adalah:

- a. Padi dengan potensi lahan seluas 28.000 Ha, yang baru terolah berkisar 17.316 Ha;
- b. Kedelai potensi lahan seluas 1.500 ha, yang baru terolah berkisar 500 Ha;
- c. Jagung potensi lahan masih cukup luas, yang baru dimanfaatkan 4.629 Ha;
- d. Durian potensi lahan masih cukup luas, yang baru dimanfaatkan 1.314 Ha;
- e. Rambutan potensi lahan masih cukup luas, yang baru dimanfaatkan 984 Ha;
- f. Jeruk siem potensi lahan masih cukup luas yang baru dimanfaatkan 805 Ha.

7. Potensi Perkebunan

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Kolaka telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat baik dari luas areal maupun produksi. Bentuk perusahaan perkebunan pada umumnya kurang lebih 95% adalah berupa perkebunan rakyat dan hanya sebahagian kecil + 5% dalam bentuk perkebunan besar yakni PT Perkebunan Ladongi, dan PTP. XIV Nusantara yang secara khusus mengembangkan komoditi kakao. Berdasarkan pada data tahun 2006 luas areal perkebunan telah mencapai 100.970 Ha dengan produksi rata-rata sebesar 81.264 ton yang terdiri atas 14 komoditi. Khusus terhadap produksi

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kakao dan cengkeh daerah ini telah diantar pulaukan baik dalam maupun ke luar negeri.

8. Potensi Perikanan

Jumlah pulau-pulau kecil 8 buah. Potensi produksi lestari perikanan ± 37.500 ton ikan. Tingkat Pemanfaatan Produksi Tangkap baru mencapai 21.301,4 ton pertahun (56,8%). Jumlah penduduk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil: 329.799 jiwa, terdapat 7.144 RTP. Luas tambak 8.500 Ha, yang potensial 4.632,36 Ha.

9. Potensi Hasil Hutan

Berdasarkan peta hasil paduserasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), luas hutan menurut fungsinya di Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :

- Hutan Lindung = 268.628 Ha
- Hutan Produksi Biasa = 78.450 Ha
- Hutan Produksi Terbatas = 116.758 Ha
- Hutan Suaka Alam = 18.680 Ha
- Hutan Produksi Konversi = 17.251 Ha

Luas Kawasan Hutan Keseluruhan 499.767 Ha dengan potensi kayu rata-rata 60 m³ / Ha. Beberapa jenis kayu yang dominan di Kabupaten Kolaka **antara** lain Kayu Meranti (*Shorea spp*), Kayu Agathis (*Aghatis sp*), Kayu Nyato (*Palagium obovatum*), Kayu Kalapi (*Kalapia celebium*) dan Kayu Bitti (*Vitex sp*).

10. Potensi Peternakan

Peluang investasi pada sektor ini berupa pengembangan dan penggemukan sapi pada lokasi-lokasi strategis dengan daya dukung lahan yang sesuai seperti di Kecamatan Watubangga terdapat kawasan padang penggembalaan seluas ± 60.000 ha, dan pada daerah-daerah padat ternak seperti Kec. Ladongi, Tirawuta, Mowewe dan Wundulako.

11. Potensi Pertambangan

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kolaka telah memiliki data dan informasi yang akurat tentang potensi sumber daya alam guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut. Potensi pertambangan tersebut meliputi:

- a. Nikel; Eksploitasi Nikel telah dilakukan oleh PT ANTAM Tbk. dan PT INCO Tbk. PT ANTAM Tbk memiliki areal eksploitasi dengan luas areal 8.314 Ha, terletak sekitar 30 km sebelah selatan ibu kota Kabupaten Kolaka. Deposit nikel tersebut ditemukan pertama kali pada tahun 1909 dan mulai di eksploitasi pada tahun 1934, sedangkan hasil produksinya diperoleh pada tahun 1939. Hingga saat ini telah dibangun 3 buah pabrik. Dua buah pabrik *ferronikel* yang telah dibangun beroperasi sejak 1975 dengan kapasitas 11.000 ton nikel/tahun, sementara pabrik Feni III dibangun tahun 2004 dengan kapasitas 24.000 ton feronikel telah mulai berproduksi pada tahun 2005. Hasil

produksi nikel tersebut telah diekspor ke berbagai sektor seperti Jepang, Belgia dan Jerman dengan total ekspor mencapai 41,5 juta dollar Amerika. Sementara *Ferronikel* mencapai 82,6 juta dollar Amerika. PT.INCO Tbk memiliki areal eksploitasi dengan luas wilayah Kontrak Karya di Pomalaa seluas 20.286,19 Ha dan 3.000 Ha diantaranya dilakukan kerjasama dengan PT. Antam Tbk. yang beroperasi Tahun 2005, sedangkan luas Kontrak Karya di Lapao-pao 6.785,75 Ha sehingga total luas Kontrak Karya PT. INCO Tbk di Kabupaten Kolaka adalah 27.071,91 Ha.

- b. Marmer; Cadangan marmer yang tersimpan diperkirakan sekitar 92,2 milyar m³ yang sudah diteliti oleh Pemda Kolaka bekerjasama Badan Riset ITB Bandung yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Tamborasi (Wolo), Perabua (Mowewe), Konaweha (Wolo) dan Wiau Mountain (Mowewe).
- c. Pasir Kuarsa; Sumber daya pasir kuarsa sekitar 3,3 juta m³ yang sudah di survey pada area 230 km² di daerah Kecamatan Watubangga. Adapun kegiatan penambangan pasir kuarsa telah dilakukan oleh PT Gasing Sulawesi dengan luas SIPD 186,25 Ha serta perkiraan produksi 150.000 ton/tahun. Pasir Kuarsa ini dikirim ke PT INCO Tbk. di Soroako Sulawesi Selatan sebagai bahan pendukung untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pengolahan biji nikel menjadi nikel matte.
- d. Granit Hitam; Diperkirakan 24 milyar m³ Granit Hitam yang telah diteliti pada areal 240 km² di Kecamatan Pomalaa, dan Wolo juga terdapat di Pulau Padamarang.
- e. Asbes; Jumlah cadangan kurang lebih 3.000 ton yang terdapat di Pulau Padamarang.
- f. Magnesite (MgCO₃); Diperkirakan 22 milyar ton kandungan magnesite yang sudah diidentifikasi di Pulau Padamarang yang menunggu untuk diolah. Penelitian telah dilakukan di 4 (empat) tempat yang berbeda di Pulau Padamarang. Potensi magnesite sekitar 240.000 ton yang mengandung MgO 40%.
- g. Onix; Sekitar 32 juta m³ telah di survey pada lokasi seluas 400 ha yang terdapat di Konaweha Kecamatan Wolo dan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga. Onix yang terdapat di Konaweha berwarna keputih-putihan, sementara yang terdapat di Ulunggolaka berwarna krem dan kebiru-biruan.

6.2 Kepemimpinan Daerah

Kabupaten Kolaka dipimpin oleh Bupati H. Ahmad Safei, SH., M.H. dan Wakil Bupati Muh. Jayadin, SE. Kepemimpinan ini merupakan masa jabatan untuk periode 2014 - 2019.

Kelembagaan DPRD merupakan DPRD hasil pemilihan Tahun 2009 yang akan berakhir periodenya pada Tahun 2014. Susunan Kepemimpinan DPRD sebagai berikut.

- a. Ketua DPRD : H. Parmin Dasir, SE
- b. Wakil Ketua DPRD : Drs. H Suaib Kasra
- c. Wakil Ketua DPRD : Drs. Tajuddin M

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai dengan jiwa Otonomi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Kolaka mempunyai kewajiban di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan urusan kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan serta komunikasi dan informatika. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada maka pelaksanaan urusan wajib di atas dilakukan sesuai skala prioritas pemerintah kabupaten.



BPKAD - PEMKAB KOLAKA

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 7
P E N U T U P

Demikian catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*Good Governance and Clean Government*).



BPKAD - PEMKAB KOLAKA